



**PENJAMINAN &
INFRASTRUKTUR**
Guarantee & Infrastructure

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

2019

LAPORAN KEBERLANJUTAN



**JAGA INFRASTRUKTUR
YANG BERKELANJUTAN UNTUK
KEMAJUAN INDONESIA**



An aerial photograph of a lush green agricultural field, likely rice, with a winding road or canal cutting through it. The field is divided into neat, parallel rows of crops. The road is a dark, paved path with white dashed lines. The overall scene is vibrant and well-maintained.

JAGA INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN UNTUK KEMAJUAN INDONESIA

Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas, tepat dan bermanfaat sejatinya merupakan bagian dari rumusan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh karenanya memasuki usia yang kesepuluh, tiba saatnya bagi PT PII untuk menyatukan kompetensi yang telah terakumulasi, memantapkan rencana dan merealisasikan

program-program pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur yang inovatif. Berbagai upaya tersebut dibutuhkan untuk mengawal dan memitigasi seluruh hambatan dan tantangan realisasi proyek-proyek infrastruktur terkait untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan dan selaras dengan pencapaian tujuan keberlanjutan.

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

Proyek

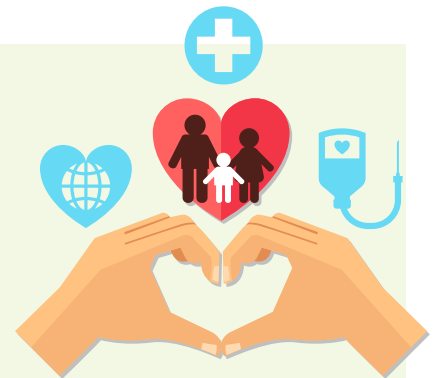
Di tahun 2019, PT PII memberikan penjaminan baru atas 3 (tiga) proyek infrastruktur dengan skema KPBU yaitu Proyek Kereta Api Makassar - Parepare, Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah dan Proyek Jalan Tol Semarang-Demak, serta penjaminan pinjaman langsung untuk pembangunan Proyek Hydropower Program. Dengan demikian hingga tahun 2019, PT PII telah menjamin 22 (dua puluh dua) proyek infrastruktur dari 6 (enam) sektor dengan total nilai investasi Rp212,4 triliun. Selain itu, PT PII juga mendapatkan penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi (PDF) untuk Proyek Proving Ground BPLJSKB di tahun 2019.



Penerapan Sosial

Realisasi proyek-proyek yang mendapatkan penjaminan PT PII turut berperan dalam mendukung tercapainya tujuan SDGs bidang sosial, yakni tujuan ke 1 - Tanpa Kemiskinan, tujuan ke 3-Kesehatan dan Kesejahteraan, tujuan ke 6-Air Bersih dan Sanitasi serta tujuan ke 8-Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak. Dalam rangka mengoptimalkan *benefit* sosial dari proyek-proyek tersebut, Perusahaan merealisasikan 11 program *Corporate Social Responsibility* untuk masyarakat dan lingkungan yang berada di sekitar lokasi proyek infrastruktur yang didukung oleh PT PII.

Fokus program CSR PT PII mencakup sektor pendidikan, pemberdayaan ekonomi kreatif, kesehatan, lingkungan, keagamaan dan sosial yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.



Lingkungan

- Penerapan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Penjaminan Proyek yang Berstandar pada *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) yang mengadopsi pada praktik kerja terbaik (*best practice*) yang berlaku global
- Mendukung realisasi 28 Proyek infrastruktur dengan potensi reduksi emisi gas rumah kaca (GRK) minimal sebesar 1.516.131 ton CO₂ ekuivalen saat seluruh proyek operasional, yang akan terus bertambah selaras dengan meningkatnya utilisasi proyek
- Menjalankan Inisiatif Kegiatan Operasional Ramah Lingkungan





98

Paket Pelatihan

971

Peserta

Pengembangan SDM

- Mendukung pengembangan pengetahuan dan pemahaman ekosistem infrastruktur melalui kegiatan *capacity building* dan sertifikasi
- Merealisasikan total 98 paket pelatihan, diikuti 971 peserta senilai Rp3,64 miliar
- Merealisasikan Survei Kepuasan Karyawan
- Mencatatkan Nihil Kecelakaan Kerja

Keuangan

Pertumbuhan Aset

↑ 4,62% Menjadi Rp11.111,24 miliar

Pertumbuhan Pendapatan

↑ 20,83% Menjadi Rp1.008,03 miliar

Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan

↑ 12,38% Menjadi Rp529,42 miliar

Pertumbuhan Ekuitas

↑ 4,69% Menjadi Rp10.971,78 miliar



Penerapan GCG

Meraih hasil penilaian penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebesar 89,082 dengan kategori “**Sangat Baik**” dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

RANGKAIAN PERISTIWA PENTING KEBERLANJUTAN

8 Januari



Penandatanganan Perjanjian Penugasan dan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU RSUD Zainoel Abidin Aceh

Proyek ini dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh terhadap sentra layanan kesehatan terpadu, agar penanganan pasien dapat dilaksanakan secara mandiri, tidak usah dirujuk ke luar Aceh. Sehingga selain menghemat biaya, juga diharapkan dapat menambah produktivitas berkat meningkatnya kesehatan masyarakat. Realisasi proyek ini juga selaras dengan **SDGs ke-3** "Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan".

5 April



PT PII Memberikan Penjaminan pada Proyek KPBU Kereta Api Makassar - Parepare

Realisasi proyek yang dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan RI ini akan mengurangi polusi kendaraan dan meningkatkan akses logistik yang lebih ramah lingkungan. Realisasi proyek ini juga selaras dengan **SDGs ke-13** "Aksi Terhadap Iklim" dan **SDGs ke-8** "Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak".

3 Mei



PT PII Memberikan Penjaminan pada Proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia untuk Koneksi Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Proyek ini mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial penduduk wilayah terluar, terpencil dan tertinggal (3 T), membuka akses telekomunikasi dan informasi dan mengurangi emisi GRK. Realisasi proyek ini juga selaras dengan **SDGs ke-9** "Infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif, berkelanjutan", **SDGs ke-13** "Aksi Terhadap Iklim" dan **SDGs ke-8** "Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak".

23 Agustus



Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Proyek KPBU Proving Ground BPLJSKB Bekasi yang dikembangkan Kementerian Perhubungan RI

Realisasi proyek ini akan mendukung dilakukannya uji standar kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Ini selaras dengan **SDGs ke-9** "Infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif, berkelanjutan".

5 September



Penandatanganan Perjanjian Penjaminan atas pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)

Proyek ini mendukung pemenuhan kebutuhan listrik memanfaatkan potensi sumber daya tenaga air yang melimpah di area pegunungan melalui pembangunan bendungan yang juga dapat difungsikan sebagai sarana pengendalian banjir dan irigasi di hilir sungai.

Proyek ini selaras dengan pencapaian **SDGs ke-7** "Energi Bersih dan Terjangkau" dan **SDGs ke-13** "Aksi Terhadap Iklim".

23 September



PT PII Memberikan Penjaminan Proyek KPBU Ruas Jalan Tol Semarang - Demak yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Proyek ini dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di ruas jalan Semarang - Demak, mengurangi polusi dan emisi GRK selain mencegah rob di kawasan Semarang Utara di sepanjang jalur yang dilalui.

Realisasi proyek ini juga selaras dengan **SDGs ke-9** "Infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif, berkelanjutan", **SDGs ke-13** "Aksi Terhadap Iklim" dan **SDGs ke-8** "Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak".

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

PENGHARGAAN

Tanggal	Penghargaan	Ajang	Penyelenggara	Masa Berlaku Penghargaan
24 Juni 2019	Public Private Partnership (PPP) Agency of The Year	The Asset Triple A Asia Infrastructure Award 2019	The Asset Magazine, Hong Kong	1 (satu) tahun
22 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Top Governance, Risk & Compliance (GRC) • Most committed leader 	Top Governance, Risk & Compliance (GRC) Award 2019	Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA), Institute Compliance Professional Indonesia (ICoPI), dan Asia Business Research Center	1 (satu) tahun
14 November 2019	3 rd Winner Kategori BUMN Keuangan Non-Listed	Annual Report Award 2018	Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Kementerian BUMN RI, dan Ikatan Akuntan Indonesia.	1 (satu) tahun
5 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • 1st Winner • Public Initiative • Public Educator • Public Risk 	Asean Risk Award 2019	Enterprise Risk Management Academy (ERMA), Singapore	1 (satu) tahun

SERTIFIKASI

Pada September tahun 2019, PT PII melalui IIGF Institute secara resmi menjadi *Certification PPP Profesional (CP3P) Accredited Training Organization (ATO)* untuk Level *Foundation* dari *Accrediting Professional Manager Globally (APMG)*. APMG PPP Certification Program merupakan program yang didukung oleh ADB, EBRD, IDB, IsDB dan World Bank Group untuk sertifikasi PPP. Sebagai ATO APMG, PT PII telah memiliki 4 (empat) orang *Certified Trainer*, 32 (tiga puluh dua) orang CP3P Level *Foundation* dan 2 (dua) orang CP3P Level *Preparation* yang siap untuk memberikan *capacity building* dan sertifikasi terkait *Public Private Partnership (PPP)* kepada *stakeholders*. Program sertifikasi ini merupakan salah satu kontribusi PT PII dalam pengembangan ekosistem infrastruktur melalui peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan.



“Penyerahan Sertifikat IIGF Institute sebagai Accredited Training Organization (ATO) dari APMG - World Bank”

DAFTAR ISI

8

Sambutan
Direktur Utama



12

Profil
Perusahaan



1 Tema: JAGA
INFRASTRUKTUR YANG
BERKELANJUTAN
UNTUK KEMAJUAN
INDONESIA



02

KERANGKA PENCAPAIAN
TUJUAN BERKELANJUTAN

2 IKHTISAR KINERJA
KEBERLANJUTAN

4 Rangkaian Peristiwa Penting
Keberlanjutan

5 Penghargaan dan Sertifikasi

23 Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Skala Global

24 Pendekatan Keberlanjutan

26 Strategi dan Laporan
Keberlanjutan



04

MENDUKUNG
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
KOMUNITAS

37 Program Sosial
Kemasyarakatan PT PII

38 Dampak Serta Manfaat Sosial
Proyek-Proyek Penjaminan

8 SAMBUTAN
DIREKTUR UTAMA



03

KINERJA EKONOMI

01

PROFIL PERUSAHAAN

13 Profil Singkat

14 Sekilas PT PII

15 Bidang Usaha

16 Visi, Misi dan Budaya
Perusahaan

18 Komposisi Pemegang Saham

19 Struktur Grup

19 Daftar Entitas Anak, Entitas
Asosiasi dan Ventura Bersama

19 Kronologi Penerbitan Saham

19 Kronologi Penerbitan dan/
atau Pencatatan Efek Lainnya

19 Skala Perusahaan

20 Portofolio Proyek Penjaminan

29 Peran PT PII

30 Kinerja Operasional

32 Kegiatan Pendukung Usaha

32 Kinerja Keuangan

32 Kontribusi Ekonomi dari
Kegiatan Usaha

33 Manfaat Ekonomi dari
Kegiatan Usaha Penjaminan
Serta Kegiatan Usaha
Penyiapan Proyek dan
Pendampingan Transaksi /
Project Development Facility
(PDF)



05

PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

41 Strategi dan Kebijakan
Pengelolaan SDM

41 Hubungan Industrial

41 Kinerja Pengelolaan SDM

42 Pengelolaan SDM

42 Rekrutmen

42 Pelatihan dan Pengembangan
Kompetensi

42 Manajemen Kinerja

43 Remunerasi dan
Kesejahteraan

43 Survei Kepuasan Karyawan

43 Demografi Karyawan

43 Lingkungan Kerja

44 Pengembangan Ekosistem
Infrastruktur

46 Aspek Kesehatan dan
Keselamatan Kerja

22

Kerangka
Pencapaian Tujuan
Keberlanjutan



58

Tata Kelola
Keberlanjutan



06

MENDORONG REALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN

- 48 Komitmen dan Kebijakan
- 49 Target Kegiatan
- 50 Penerapan Kebijakan
Lingkungan Dalam
Penjaminan Proyek
- 52 Manfaat Lingkungan Proyek-
Proyek Penjaminan dan
Pendampingan Transaksi



07

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

- 59 Komitmen dan Tujuan
- 59 Struktur dan Mekanisme
Tata Kelola
- 59 Rapat Umum Pemegang Saham
- 59 Dewan Komisaris
- 61 Direksi
- 62 Manajemen Risiko
- 62 Sistem Pengendalian Internal
- 62 Benturan Kepentingan
- 62 Audit Internal
- 62 Kode Etik Perusahaan
- 62 Sistem Pelaporan Pelanggaran
- 63 *Assessment* Pengetahuan dan
Persepsi *Stakeholder*

Sambutan Direktur Utama



M. Wahid Sutopo
Direktur Utama



PT PII hadir dengan menjalankan peran penjaminan bagi terlaksananya proyek infrastruktur dan menjadi lembaga yang turut mengelola risiko infrastruktur sehingga proyek-proyek yang dimaksud menjadi transparan dan akuntabel prosesnya, jelas alokasi risikonya, *bankable* dan dapat direalisasikan.



Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Melalui Laporan Keberlanjutan edisi perdana untuk periode tahun 2019 ini PT PII menyampaikan komitmen dan berbagai upaya yang dilakukan serta pencapaian kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sebagai realisasi peran serta Perseroan dalam mewujudkan pembangunan bangsa secara berkesinambungan yang selaras dengan pencapaian beragam rumusan tujuan keberlanjutan dalam SDGs.

Sebagai salah satu *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan dengan mandat utama memberikan penjaminan terhadap proyek infrastruktur Pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun non-KPBU, pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDG) memiliki makna penting. Bagi Perseroan, upaya pencapaian tujuan SDGs merupakan wujud partisipasi bagi pencapaian tujuan keberlanjutan, selain juga bermakna sebagai dukungan penuh terhadap komitmen Pemerintah Indonesia mewujudkan partisipasinya dalam mendukung perbaikan kondisi iklim global. Selain itu, realisasi pembangunan berbagai proyek infastruktur dasar pada dasarnya memang selaras dengan mayoritas tujuan SDGs.

Sehubungan dengan peran Perseroan dalam memberikan penjaminan serta mendukung penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, Perseroan aktif mengembangkan kemitraan dengan berbagai lembaga terkait untuk memastikan realisasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur dasar selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

TANTANGAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN KEBERLANJUTAN

Kondisi Sektor Infrastruktur

Secara umum dapat disampaikan bahwa ketersediaan infrastruktur Indonesia, masih cukup jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain yang setara untuk dapat memastikan daya saing Indonesia ditengah persaingan ekonomi skala global. Hal ini tampak dari posisi Global Competitiveness Index (GCI) 2019 yang dirilis World Economic Forum dimana Indonesia berada di peringkat 72 dari 141 negara yang di survei dan urutan kelima di kawasan ASEAN.

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

Pemerintah Indonesia telah berupaya memperbaiki kondisi tersebut dengan menempatkan program pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 maupun kemudian RPJMN (2020-2024) dengan menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Prioritas, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden No 58 Tahun 2018 serta proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan menggunakan skema KPBU.

Salah satu kendala utama dalam merealisasikan proyek-proyek infrastruktur adalah lamanya masa pengembalian dan kompleksitas dalam pelaksanaannya yang membuat potensi risiko infrastruktur dari proyek dimaksud menjadi tinggi yang berdampak pada kelayakan maupun bankability dari proyek.

Untuk mengatasi hal tersebut, PT PII hadir dengan menjalankan peran penjaminan bagi terlaksananya proyek infrastruktur dan menjadi lembaga yang turut mengelola risiko infrastruktur sehingga proyek-proyek yang dimaksud menjadi transparan dan akuntabel prosesnya, jelas alokasi risikonya, *bankable* dan dapat terealisasi. Tantangannya bagi PT PII adalah, ketersediaan sumber daya untuk dapat mengidentifikasi, mengelola, merancang mitigasi serta memantau risiko-risiko yang melekat dari proyek-proyek tersebut, dan menuangkannya dalam suatu struktur penjaminan tertentu, sesuai ketentuan regulasi, praktik penjaminan berstandar global dan kapasitas perusahaan.

Untuk mengatasinya, setiap tahun Perseroan merealisasikan sejumlah anggaran pengembangan kompetensi SDM, mengembangkan kapabilitas dalam mengelola risiko dan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga kredibel dunia agar dapat bersama-sama mengembangkan model-model penjaminan yang dapat memastikan terjadinya mitigasi risiko proyek-proyek tersebut, dan bahkan mengoptimalkan manfaat dari proyek-proyek tersebut dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan, sehingga selaras dengan pencapaian tujuan keberlanjutan.

Pada tahun 2019 PT PII juga mempertajam berbagai ketentuan dalam penjaminan dengan memasukan mitigasi risiko sosial dan lingkungan, sebagai pertimbangan pemberian penjaminan.

Kinerja dan Kontribusi di Bidang Ekonomi

Secara umum, hingga akhir tahun 2019, Perseroan telah berhasil memberikan penjaminan terhadap 22 (dua puluh dua) proyek infrastruktur dengan total nilai investasi proyek sebesar Rp212,4 triliun dan dengan nilai penjaminan total sebesar Rp55,65 triliun. Sehingga rasio nilai investasi proyek yang dijamin terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) PT PII yang sebesar Rp8 triliun adalah 26,5x. Ini menunjukkan bahwa dengan penjaminan PT PII, dapat meningkatkan jumlah investasi kepada infrastruktur nasional secara signifikan artinya Perseroan berhasil mendukung badan usaha dan lembaga keuangan lain untuk bersama-sama terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pembiayaan infrastruktur nasional mewujudkan realisasi layanan infrastruktur kepada masyarakat nasional.

Berkat penjaminan yang diberikan, realisasi proyek-proyek tersebut memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi negara dan masyarakat. Sesuai hasil kompilasi perhitungan pihak independen, proyek-proyek dimaksud memberikan kontribusi tambahan nilai ekonomi hingga sebesar Rp327,60 triliun, di samping memberikan beragam manfaat ekonomi lainnya.

Berbagai manfaat ekonomi dari beragam proyek tersebut selaras dengan pencapaian tujuan SDGs di bidang perekonomian, meliputi: SDGs ke-6 “Air Bersih dan Sanitasi”, SDGs ke-7 “Energi Bersih dan Terjangkau”, SDGs ke-8 “Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak” dan SDGs ke-9 “Infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan.”

Kinerja dan Kontribusi di Bidang Sosial

Pada aspek sosial kemasyarakatan, PT PII merealisasikan beragam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) bagi masyarakat sekitar dan sektor yang terdampak langsung oleh realisasi proyek-proyek infrastruktur yang dijamin oleh PT PII. Kegiatan CSR dimaksud meliputi: Pemberdayaan ekonomi kreatif dalam Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika; Program pembuatan *eco brick*, Pengembangan kualitas pendidikan SD-SMP pada KPBU Jakarta-Cikampek II Selatan; Program Kemenkeu Mengajar; Operasi bibir sumbing; *Teleteaching* bersama Universitas Trilogi, Santunan bulan Ramadhan; dan lain sebagainya.

Selain itu, dukungan PT PII pada beberapa proyek sektor sosial seperti sektor air minum yaitu Proyek SPAM Umbulan, SPAM Kota Bandar Lampung dan SPAM Semarang Barat secara keseluruhan melayani 391.000 sambungan rumah untuk hampir 2 juta penduduk disekitar lokasi proyek. Proyek-proyek sosial sebagaimana dimaksud diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berbagai manfaat sosial dari beragam proyek tersebut selaras dengan pencapaian tujuan SDGs di bidang sosial, meliputi: **SDGs ke-1** “Tidak ada kemiskinan di seluruh tingkatan”, **SDGs ke-3** “Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan”. **SDGs ke-6** “Air Bersih dan Sanitasi” dan **SDGs ke-8** “Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak”.

Kinerja dan Kontribusi Lingkungan

Pada aspek sosial lingkungan PT PII berupaya mengoptimalkan kontribusi terhadap upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui 3 pendekatan, yakni: penerapan kebijakan penjaminan proyek ramah lingkungan, penerapan kegiatan operasional ramah lingkungan dan program pelestarian alam dari kegiatan CSR. Penerapan standar *safeguard Environment & Social* (ENS) yang mengacu pada *best practice* internasional menunjukkan bahwa proyek-proyek yang mendapatkan penjaminan serta penyiapan proyek dan pendampingan transaksi dari PT PII juga memberi kontribusi pada upaya menjaga kelestarian lingkungan dalam bentuk: pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) total sebesar 1.516.131 ton CO₂ ekuivalen per tahun, perluasan area penghijauan dari mekanisme alih guna lahan, perbaikan kualitas sanitasi dan sumber air tanah maupun sungai, dan sebagainya.

Sebagai gambaran, target penurunan emisi dalam RAN-GRK Nasional 2010-2020 bidang Energi-transportasi adalah sebesar 38 juta ton CO₂ ekuivalen (26%) dengan upaya sendiri. Potensi proyek-proyek PT PII tersebut, berarti memberi kontribusi penurunan sebesar 4,0% pada bidang energi-transportasi.

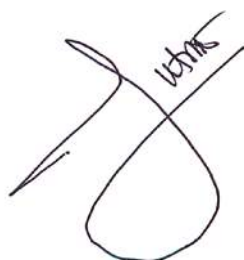
Kontribusi ini diyakini akan semakin besar, seiring dengan bertambahnya proyek-proyek penjaminan dimasa mendatang dan meningkatnya utilitas proyek yang telah operasional. Adapun besaran target RAN-GRK untuk periode 2020-2030 yang telah dinaikan menjadi 29%, masih dalam perhitungan.

Berbagai manfaat lingkungan dari beragam proyek tersebut selaras dengan pencapaian tujuan SDGs di bidang lingkungan, meliputi: SDGs ke-6 “Air Bersih dan Sanitasi”, SDGs ke-7 “Energi Bersih dan Terjangkau”, SDGs ke-13 “Aksi Terhadap Iklim” dan SDGs ke-14 “Kehidupan Bawah Air.”

PENUTUP

Kami meyakini seluruh upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019 telah memberi gambaran jelas kepada para pemangku kepentingan mengenai komitmen PT PII dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan sekaligus mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan melalui optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, dan optimalisasi kualitas pelaksanaan proyek penjaminan. Akhir kata, atas nama Direksi, kami menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan atas berbagai pencapaian PT PII di tahun 2019.

Jakarta, Maret 2020



M. Wahid Sutopo
Direktur Utama

01

Profil
Perusahaan



PROFIL SINGKAT

Nama Perusahaan

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Nama Panggilan

PT PII



Perubahan Nama

Hingga periode 31 Desember 2019, Perusahaan tidak mengalami perubahan nama.



Bidang Usaha

Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur



Tanggal Pendirian

30 Desember 2009



Anggaran Dasar dan Perubahan

- Akta Pendirian oleh Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH. LLM No. 29 tanggal 30 Desember 2009.
- Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan Akta No. 08 tanggal 05 Desember 2019 oleh Notaris Arry Supratno, S.H.



Komposisi Pemegang Saham

- 100% milik Negara Republik Indonesia, dengan demikian PT PII:
- Tidak menerbitkan warkat saham
- Tidak memiliki kebijakan ESOP



Status Perusahaan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan



Modal Dasar

Rp9.000.000.000.000, terdiri dari 9.000.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp8.000.000.000.000, terdiri dari 8.000.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham



Rating Perusahaan

BBB dari Fitch Rating



Alamat Kantor Pusat

Capital Place, Lt 7 & 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710 - Indonesia
Telp. 021-5795 0550, Fax. 021-5795 0040



E-mail Perusahaan

info@iigf.co.id



Website Perusahaan

<https://www.ptpii.co.id>



Produk Jasa dan Layanan

- Penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur untuk proyek kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- Penjaminan Pemerintah terhadap pinjaman dan penerbitan obligasi BUMN untuk membiayai penyediaan infrastruktur (Non-KPBU);
- Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi (*Project Development Facility*).



Perubahan dalam Organisasi

Tidak ada perubahan berarti dalam tahun pelaporan



Keanggotaan dalam Organisasi

- Badan Usaha Milik Negara
- Kantor Bersama KPBU (*PPP Joint Office*)
- Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
- Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia
- International Project Finance Association (IPFA)

SEKILAS PT PII

Dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur lama maupun baru, Pemerintah Indonesia membuka ruang partisipasi kepada pihak swasta dengan menyediakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Untuk mendukung berjalannya KPBU di Indonesia, pada 30 Desember 2009 Pemerintah mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/"PT PII", yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan sebagai layanan satu pelaksana (*single window*) dalam mengevaluasi, menyusun struktur penjaminan serta pemberian jaminan bagi proyek infrastruktur berskema KPBU. Sebagai dasar pelaksanaan KPBU, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan infrastruktur. Sesuai dengan berbagai ketentuan dalam PP No.38/2015, Perseroan dapat memberikan penjaminan terhadap 19 sektor proyek infrastruktur.

Penjaminan infrastruktur melalui PT PII merupakan salah satu bentuk dukungan dari Pemerintah untuk memberikan kepastian kepada swasta terkait komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam perjanjian KPBU. Untuk menjalankan fungsi penjaminan sebagai bidang usaha utama, hingga saat ini, Pemerintah telah melakukan penyertaan modal dari APBN ke PT PII sebesar Rp8 triliun. PT PII kemudian berusaha mengurangi ketergantungan pembiayaan proyek infrastruktur pada APBN dengan menjalin kerja sama dengan berbagai institusi keuangan, baik institusi multilateral (Bank Dunia, ADB, IDB, MIGA), institusi bilateral, dan lainnya.

Mengingat besarnya kebutuhan dukungan dana non-APBN dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah kemudian mengeluarkan PP No.50/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009, dengan memperluas mandat PT PII untuk dapat memberikan penjaminan atas proyek Non KPBU. Perluasan mandat tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2018. Selanjutnya sejak 2018, ruang lingkup kegiatan usaha diperluas dengan masuknya tugas pendampingan, mulai tahap penyiapan hingga pelaksanaan transaksi, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018.

Sebagai realisasi dari mandat tersebut, hingga tahun 2019, PT PII telah melaksanakan penjaminan atas 20 (dua puluh) proyek infrastruktur skema KPBU dan 2 (dua) proyek infrastruktur skema Non KPBU yang terdiri dari berbagai sektor, antara lain 11 proyek sektor jalan, 4 proyek sektor telekomunikasi dan informatika, 3 proyek sektor air minum, 1 proyek sektor transportasi, 2 proyek sektor ketenagalistrikan, dan 1 proyek sektor pariwisata dengan total nilai investasi Rp212,4 triliun. Dari sisi penyiapan, PT PII telah mendapatkan penugasan untuk melakukan pendampingan dan penyiapan transaksi untuk 6 (enam) proyek yang meliputi sektor jalan, transportasi dan kesehatan.

Selain pelaksanaan mandat-mandat tersebut, PT PII juga terus berupaya untuk membangun ekosistem dan pemahaman terkait pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia sehingga PT PII dapat mewujudkan visinya untuk menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

BIDANG USAHA



KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir PT PII, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk memberikan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan:

1. Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial Pemerintah dalam perjanjian kerja sama Pemerintah dan badan usaha dalam proyek-proyek infrastruktur yang mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan kewajiban kontingensi Pemerintah dan meningkatkan kelayakan kredit (*credit worthiness*) proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha di bidang infrastruktur.
2. Pemberian penjaminan terhadap kewajiban pembayaran Badan Usaha Milik Negara dan/atau afiliasinya terkait penyediaan infrastruktur, yang timbul sebagai akibat dari:
 - a. Pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan;
 - b. Penerbitan obligasi dan/atau instrumen keuangan lainnya;
3. Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial dari pihak lain, selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan b dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberian dukungan fasilitasi penyiapan proyek infrastruktur, penilaian kelayakan, dan pemantauan

risiko serta hal-hal lain terkait penyediaan penjaminan Pemerintah.

5. Kerja sama dengan pihak lain termasuk lembaga keuangan multilateral dalam rangka pelaksanaan pemberian penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c.
6. Usaha patungan atau penyertaan modal pada badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sejenis dengan maksud dan tujuan Perseroan.
7. Pemberian jasa konsultasi dan penyediaan informasi untuk meningkatkan kualitas alokasi risiko dan struktur pembiayaan proyek dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
8. Kegiatan lainnya untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Bidang Usaha yang dijalankan oleh PT PII adalah sesuai dengan Bidang Usaha yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Produk dan Jasa

1. Penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur untuk proyek kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
2. Penjaminan Pemerintah terhadap pinjaman dan penerbitan obligasi BUMN untuk membiayai penyediaan infrastruktur (Non-KPBU);
3. Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi (*Project Development Facility*).

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Visi

Menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Pengesahan Visi dan Misi

Visi dan Misi PT PII telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Jangka Panjang Perusahaan periode 2018-2022 pada tanggal 27 Desember 2017.

Misi

Memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang:

- Memiliki dampak kemanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia.
- Melindungi kepentingan Pemerintah dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur melalui proses yang transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan kepercayaan dari pihak investor dengan memberikan kenyamanan berinvestasi dan kepastian pembayaran atas klaim risiko kerugian suatu proyek infrastruktur yang dikerjasamakan.

Budaya Perusahaan



INTEGRITY

- Menjaga komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas
- Taat terhadap aturan Perusahaan
- Bertanggung jawab atas setiap perbuatan, perkataan dan keputusan



TEAM WORK

- Memberikan kontribusi keterampilan dan pengetahuan
- Mengutamakan kepentingan tim untuk mencapai tujuan Perusahaan



THINK BIG

- Memiliki pemikiran luas dan mutakhir
- Senantiasa meningkatkan pengetahuan, terbuka terhadap perkembangan



MUTUAL TRUST

- Pemenuhan standar layanan yang ada
- Saling percaya dan saling hormati



EXCELLENCE

- Memberikan yang terbaik dalam melaksanakan semua tugas
- Berupaya untuk melakukan perbaikan berkesinambungan



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI



KEPEMILIKAN SAHAM YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH

Kepemilikan Saham PT PII 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, oleh karena itu hanya terdapat 1 (satu) pemegang saham yang memiliki saham yang mencapai 5% atau lebih, yakni Negara Republik Indonesia.

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase
Negara Republik Indonesia	8.000.000 lembar	100%

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Saham PT PII sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sehingga tidak terdapat kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PII di Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi juga tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Lembar Saham		
		Pada PT PII	Di Luar PT PII	Jumlah Lembar Saham
Ayu Sukorini	Komisaris Utama	x	x	x
Mariatul Aini	Komisaris	x	x	x
M. Rahman Ritza	Komisaris	x	x	x

Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan Lembar Saham		
		Pada PT PII	Di Luar PT PII	Jumlah Lembar Saham
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama	x	x	x
Salusra Satria	Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek	x	x	x

STRUKTUR GRUP

Hingga periode yang berakhir pada 31 Desember 2019, PT PII tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle Company*, sehingga tidak ada hal yang dapat dilaporkan terkait Struktur Grup Perusahaan.

DAFTAR ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Hingga akhir tahun 2019, PT PII tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle Company*.

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM

Hingga akhir tahun 2019, saham PT PII dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia dan tidak pernah terdaftar di bursa saham mana pun, sehingga tidak ada informasi yang diberikan mengenai kronologis penerbitan saham (termasuk penempatan pribadi) dan/atau daftar saham dari awal hingga akhir tahun fiskal.

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

Hingga 31 Desember 2019, PT PII belum pernah menerbitkan efek dalam bentuk apapun yang diperdagangkan di bursa manapun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku.

SKALA PERUSAHAAN

SKALA EKONOMI

Hingga 31 Desember 2019, skala usaha PT PII digambarkan dalam tabel berikut:

Keterangan	2019	2018	2017
Jumlah Karyawan	132	128	107
Pendapatan Usaha (Rp juta)	1.008.035	834.252	765.959
Total Kapitalisasi (Rp juta):			
- Liabilitas (Rp juta)	139.457	140.245	109.202
- Ekuitas (Rp juta)	10.971.783	10.480.671	10.251.444
- Aset Total (Rp juta)	11.111.240	10.620.916	10.360.646
Jumlah Kantor	1	1	1

Portofolio Proyek Penjaminan

Sektor Ketenagalistrikan		
1	PLTU Jawa Tengah (Batang)	2 x 1.000 MW Rp 61,46 triliun
2	Hydropower Programme	35.000 MW Rp 6,57 triliun
Sektor Telekomunikasi		
3	Palapa Ring Paket Barat	1.711 Km Kabel Laut 427 Km Kabel darat Rp 1,23 triliun
4	Palapa Ring Paket Tengah	1.797 Km Kabel Laut 1.289 Km Kabel darat Rp 1,09 triliun
5	Palapa Ring Paket Timur	4.508 Km Kabel Laut 2.379 Km Kabel darat Rp 5,09 triliun
6	Satelit Multi Fungsi	150 Gbps Rp 6,42 triliun

Sektor Jalan		
7	Jalan Tol Batang - Semarang	75 Km Rp 14,49 triliun
8	Jalan Tol Manado - Bitung	39,9 Km Rp 5,12 triliun
9	Jalan Tol Pandaan - Malang	38,49 Km Rp 6,44 triliun
10	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	99,35 Km Rp 9,97 triliun
11	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Elevated	36,4 Km Rp 16,23 triliun
12	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	60,1 Km Rp 8,41 triliun



Keterangan:



Proyek KPBUs



Proyek Non-KPBUs

13	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	38,3 Km Rp 12,22 triliun
14	Jalan Tol Serang - Panimbang	83,7 Km Rp 5,33 triliun
15	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	172,9 Km Rp 23,39 triliun
16	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan	64 Km Rp 14,69 triliun
17	Jalan Tol Semarang - Demak	27 Km Rp 5,44 triliun

Sektor Sistem Penyediaan Air Minum

18	SPAM Umbulan - Jawa Timur	4.000 liter/detik Rp 2,06 triliun
19	SPAM Kota Bandar Lampung	750 liter/detik Rp 750 miliar
20	SPAM Semarang Barat	1.000 liter/detik Rp 417 miliar

Sektor Pariwisata

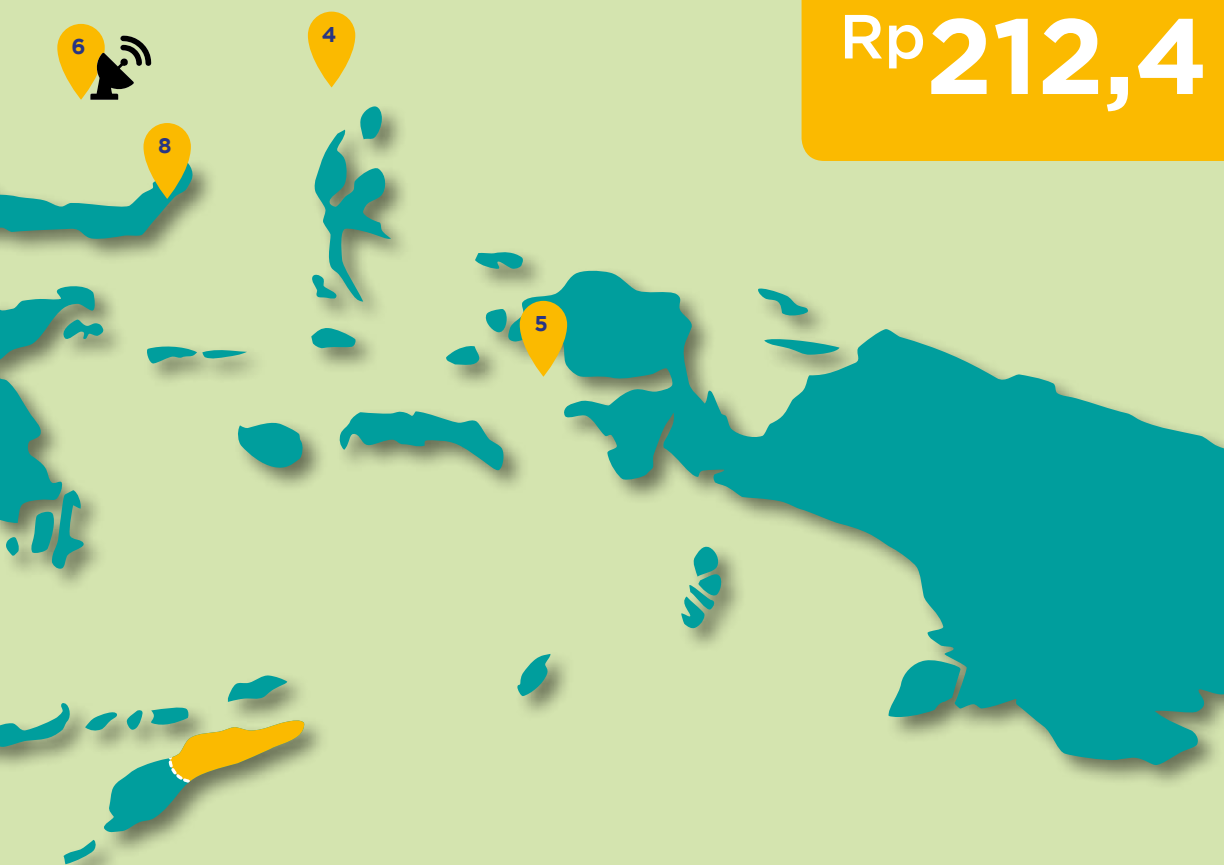
21	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika	Rp 4,58 triliun
----	--	------------------------

Sektor Transportasi

22	KA Makassar - Parepare	Rp 1,01 triliun
----	------------------------	------------------------

Total Nilai Investasi

Rp**212,4** triliun



02

**Kerangka
Pencapaian
Tujuan
Keberlanjutan**



KERANGKA PENCAPAIAN TUJUAN KEBERLANJUTAN

Guna memastikan pencapaian beragam tujuan pembangunan dalam SDGs, PT PII telah menyusun strategi pengembangan usaha sebagai rujukan yang komprehensif guna memastikan terjadinya pertumbuhan usaha yang berkualitas dalam jangka panjang, mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan menyeimbangkan kinerja pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SKALA GLOBAL

Sebagai kelanjutan dari penerapan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang diberlakukan pada periode 2000-2015, mulai awal tahun 2016 hingga akhir tahun 2030 seluruh negara di dunia telah sepakat untuk mulai menerapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Indonesia menjadi salah satu dari banyak negara yang telah menyatakan komitmennya untuk bersama-sama warga dunia lainnya, berupaya mencapai beragam rumusan tujuan pembangunan berkelanjutan skala global dalam SDGs. Rumusan tujuan pembangunan dimaksud, disebut juga Global Goals, meliputi lima aspek dasar dalam prinsip keberlanjutan, yakni 5-P, *People, Planet, Partnership, Peace, Prosperity*, yang kemudian dijabarkan kedalam 17 rumusan tujuan, sebagai berikut.

1.	Tanpa Kemiskinan	- Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2.	Tanpa Kelaparan	- Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.
3.	Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan	- Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat di segala usia.
4.	Pendidikan Berkualitas	- Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang.
5.	Kesetaraan Gender	- Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan anak perempuan.
6.	Air Bersih dan Sanitasi	- Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7.	Energi Bersih dan Terjangkau	- Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang.
8.	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak	- Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, produktif serta menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua.
9.	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	- Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.
10.	Mengurangi Kesenjangan	- Mengurangi kesenjangan di dalam sebuah Negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11.	Kebertahanan Kota dan Komunitas	- Membangun kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan dan berkelanjutan.
12.	Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab	- Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

KERANGKA PENCAPAIAN TUJUAN KEBERLANJUTAN

13.	Aksi Terhadap Iklim	- Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14.	Kehidupan Bawah Laut	- Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk pengembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15.	Kehidupan di Darat	- Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggundulan hutan, menghentikan dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
16.	Institusi Peradilan yang Kuat dan Perdamaian	- Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua pihak termasuk untuk lembaga, membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
17.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	- Memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



Indonesia menunjukkan komitmen tinggi dalam menerapkan agenda pembangunan berkelanjutan dan telah mengeluarkan Peraturan Presiden (PerPres) no 59 tahun 2017 tentang “Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. PerPres 59 juga menegaskan perlu dirumuskannya Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) – RAN TPB, maupun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) – RAD TPB, suatu dokumen yang memuat program dan rencana kerja 5 (lima) tahunan bagi pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran nasional maupun daerah, dan sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Sebagai bagian dari implementasi program RAN TPB dan RAD TPB tersebut, pada awal kuartal IV-2018, Kementerian Keuangan mendeklarasikan **SDG Indonesia One**, platform rencana kerja sebagai wujud implementasi berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian rumusan tujuan dalam TPB, melalui ketersediaan akses pendanaan.

PENDEKATAN KEBERLANJUTAN

Landasan pencapaian tujuan keberlanjutan adalah terpenuhinya harapan para pemangku kepentingan. Untuk itu, Perseroan telah mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan menganalisa beberapa topik keberlanjutan yang relevan dengan keberadaan mereka. Identifikasi pemangku kepentingan dilakukan melalui pelaksanaan *Forum Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk di antaranya identifikasi dampak potensial yang mungkin dialami dan ditimbulkan oleh kegiatan proyek yang dijamin maupun diawasi oleh Perseroan dan respons Perseroan terhadap harapan para pemangku kepentingan.

Terdapat 7 kelompok pemangku kepentingan dalam kegiatan usaha Perseroan, yakni: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Investor/Kreditur, Karyawan, Vendor, Media, dan Masyarakat.

Adapun ringkasan pengelolaan hubungan dengan para pemangku kepentingan yang dijalankan Perseroan adalah sebagai berikut.

Ringkasan Pengelolaan Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan & Basis Penetapan	Metode Pendekatan / Frekuensi Pertemuan	Fokus Perhatian	Tindak Lanjut
Pemerintah Pusat/ Pemegang Saham <ul style="list-style-type: none"> Pengaruh Kewajiban Representative 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan reguler dengan unsur Pemerintah RUPS sesuai kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan pada peraturan dan perundangan Hubungan harmonis dan konstruktif dengan regulator, jujur dan integritas Laporan tahunan kepada pemegang saham Penyelesaian proyek tepat waktu dan tepat kualitas Kontribusi positif pada masyarakat & perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> Kejelasan realisasi program pembangunan infrastruktur Sinkronisasi program pembangunan infrastruktur Memenuhi peraturan pemerintah Menjalin kerja sama riset dan program pengembangan sosial ekonomi dan lingkungan. Peretujuan laporan pertanggung jawaban
Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> Pengaruh Ketergantungan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pertemuan khusus Pertemuan koordinasi sesuai kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman penjaminan proyek infrastruktur Penyelesaian dan sinkronisasi proyek agar tepat waktu dan tepat kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Program <i>Capacity Building</i> Kesepakatan jadwal penyelesaian proyek Kejelasan program pembangunan infrastruktur
Kreditur/Investor <ul style="list-style-type: none"> Pengaruh Ketergantungan 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan koordinasi Manajemen keluhan pelanggan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian proyek tepat waktu dan tepat kualitas Akuntabilitas biaya 	<ul style="list-style-type: none"> Kesepakatan jadwal penyelesaian proyek, tepat waktu dan kualitas Pelibatan akuntan dan penilai independen
Karyawan <ul style="list-style-type: none"> Representative Ketergantungan & Kewajiban 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan <i>gathering</i> Forum Komunikasi Pertemuan rutin sesuai kebutuhan <i>Workshop, mentoring & coaching</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Kejelasan hak dan kewajiban Kejelasan evaluasi kinerja, jenjang karir dan remunerasi Prinsip kesetaraan kesempatan dan hak 	<ul style="list-style-type: none"> Program-program pengembangan kompetensi karyawan Penetapan jenjang karir dan syarat-syarat promosi Perhitungan bonus dan remunerasi
Vendor/Supplier <ul style="list-style-type: none"> Mitra Kerja Dependency 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan berkala Audit kinerja berkala 	<ul style="list-style-type: none"> Proses pengadaan barang yang wajar dan transparan Seleksi dan evaluasi kandidat mitra bisnis yang obyektif Prosedur administrasi dan payment akurat & sederhana Hubungan harmonis 	<ul style="list-style-type: none"> Masukan untuk meningkatkan kinerja pasokan dan administrasi barang/jasa Perubahan list daftar <i>supplier/ vendor</i>
Media <ul style="list-style-type: none"> Proximity 	<ul style="list-style-type: none"> Siaran pers Pertemuan media Jumpa pers 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbukaan informasi sesuai ketentuan peraturan Informasi akurat dan cepat 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya image perusahaan Pembentukan <i>Corporate Communication/Hubungan Investor</i>
Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> Proximity 	<ul style="list-style-type: none"> Program tata hubungan komunitas Pertemuan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan harmonis Minimalisasi dampak operasional Kontribusi positif ekonomi, sosial dan lingkungan dan penyampaian keluhan gangguan 	<ul style="list-style-type: none"> Program pemberdayaan/CSR Bantuan pembangunan infrastruktur umum & sosial dasar Penghijauan dan pemeliharaan lingkungan Penyelesaian keluhan masyarakat gangguan

KERANGKA PENCAPAIAN TUJUAN KEBERLANJUTAN

STRATEGI DAN LAPORAN KEBERLANJUTAN

Guna memastikan pencapaian beragam tujuan pembangunan dalam SDGs, Perseroan telah menyusun strategi pengembangan usaha sebagai rujukan dalam memastikan terjadinya pertumbuhan usaha yang berkualitas dalam jangka panjang. Kerangka rencana pengembangan usaha berkesinambungan tersebut disusun dengan tujuan mempertemukan kepentingan pengembangan usaha, pelaksanaan mandat dari pemegang saham/Pemerintah Pusat, optimasi dampak ekonomi dan sosial, terjaganya kelestarian lingkungan dan pengembangan sosial kemasyarakatan. Keseimbangan kinerja tersebut diupayakan melalui pemenuhan harapan para pemangku kepentingan sesuai sumber daya yang tersedia. Untuk itu, Perseroan juga memperhatikan dengan cermat harapan para pemangku kepentingan melalui pengelolaan hubungan yang berkualitas dengan para pemangku kepentingan.

Dalam rangka memberi gambaran kepada Para Pemangku Kepentingan dan terutama kepada Pemegang Saham mengenai apa yang telah direncanakan dan dilakukan Perseroan dalam mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan, PT PII mulai tahun operasional 2019 dan seterusnya akan menyusun dan menerbitkan Laporan Keberlanjutan secara berkala.

Pada edisi perdana ini, Perseroan menyajikan Laporan Keberlanjutan dengan memperhatikan berbagai rujukan yang relevan, termasuk rumusan tujuan keberlanjutan SDGs, Pedoman Pelaporan Keberlanjutan dari Global Reporting Initiative dan Prinsip-prinsip Keberlanjutan dalam ISO 26000.

03

KINERJA EKONOMI



KINERJA EKONOMI

Sampai dengan tahun 2019, PT PII telah memberikan penjaminan atas 22 proyek infrastruktur skema KPBU maupun non KPBU dari berbagai sektor yang akan memberikan dampak dan manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan kegiatan ekonomi disekitar lokasi proyek, peningkatan efisiensi arus logistik dan membuka lapangan kerja.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan daya saing global, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan. Dalam rangka mendorong percepatan penyediaan Infrastruktur nasional, Pemerintah telah merencanakan dan merealisasikan program pengembangan dan perbaikan Infrastruktur sebagaimana tertuang dalam RPJMN (2015-2019) yang utamanya menasar wilayah dengan tingkat ketersediaan Infrastruktur rendah seperti Indonesia Timur, dengan perhitungan kebutuhan dana Rp4.796,2 triliun.

Pada periode tersebut fokus utamanya adalah pada terciptanya pembangunan dan penguatan Infrastruktur dasar untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat melalui realisasi berbagai proyek jalan nasional dan jalan tol, pengembangan bandara, dan pelabuhan. Baru kemudian diikuti dengan pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dan infrastruktur pendukung pemenuhan kebutuhan primer maupun sosial.

Pada RPJMN (2020-2024), arah strategis pembangunan infrastruktur mengacu pada sasaran transformasi digital dengan mengutamakan prinsip keterhubungan satu sama lain (*connecting living*) dan kemampuan mengumpulkan serta menganalisa berbagai informasi dengan berfokus pada pembangunan manusia, ekonomi, wilayah, Infrastruktur dan polhumnankam. Total dana yang dibutuhkan mencapai Rp6.445 triliun atau meningkat sebesar 34% dari RPJMN (2015-2019).

Untuk mengatasi kendala keterbatasan anggaran yang dapat disediakan melalui APBN dalam mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur tertuang pada RPJMN tersebut, Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan kemudian mengembangkan alternatif pembiayaan lain. Alternatif tersebut adalah mengajak swasta nasional maupun lembaga kredibel lainnya untuk turut mendukung pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun melalui penugasan kepada BUMN.



PERAN PT PII

Realisasi proyek-proyek infrastruktur tersebut membutuhkan dukungan fungsi penjaminan, sebagai bentuk mitigasi risiko kegagalan realisasi proyek bagi para kreditor/investor maupun pelaksana. Fungsi penjaminan itulah yang dijalankan oleh PT PII, baik untuk proyek-proyek dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership (PPP)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, maupun dalam skema Non-KPBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2018. Pemerintah kemudian memperluas tugas PT PII dengan diberikannya mandat pendampingan, mulai tahap penyiapan hingga pelaksanaan transaksi, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018.

PT PII sebagai salah satu *Special Mission Vehicle (SMV)* Kementerian Keuangan bertindak sebagai *single window* dalam mengevaluasi kelayakan proyek infrastruktur, membantu mengembangkan struktur proyek dan penjaminan yang *bankable* dan *workable*, memonitor kelancaran rencana mitigasi risiko Proyek sampai kepada memproses klaim terhadap penjaminan jika terjadi *default* Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (“PJK”). PT PII sebagai penjamin berperan bagi terlaksananya proyek infrastruktur dengan menjadi lembaga yang turut mengelola risiko

infrastruktur sehingga proyek-proyek dimaksud menjadi transparan dan akuntabel prosesnya, jelas alokasi risikonya, *bankable*, dan dapat direalisasikan.

Berdasarkan mandat yang diberikan kepada PT PII tersebut, PT PII telah memberikan penjaminan atas 22 proyek infrastruktur skema KPBU maupun non KPBU dari sektor jalan, telekomunikasi dan informatika, air minum, transportasi, ketenagalistrikan dan kawasan pariwisata serta fasilitas pendampingan 6 proyek KPBU sektor jalan, transportasi dan rumah sakit.

Pengembangan proyek-proyek infrastruktur yang dijamin dan didampingi oleh PT PII tersebut akan memberikan dampak dan manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan kegiatan ekonomi disekitar lokasi proyek, peningkatan efisiensi arus logistik dan membuka lapangan kerja.

Realisasi seluruh proyek-proyek infrastruktur tersebut selaras dengan pencapaian 9 tujuan SDGs, yakni: Ke-1, Tidak ada kemiskinan; Ke-3, Kesehatan dan Kesejahteraan; Ke-6, Air Bersih dan Sanitasi; Ke-7, Energi Bersih dan Terjangkau; Ke-8, Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak; Ke-9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Ke-10, Mengurangi Kesenjangan; Ke-11, Keberlanjutan Kota dan Komunitas; dan Ke-13, Aksi Terhadap Iklim.

KINERJA EKONOMI

KINERJA OPERASIONAL

Penjaminan

Sampai dengan tahun 2019, PT PII telah memberikan penjaminan atas 22 proyek infrastruktur skema KPBU maupun non KPBU dari berbagai sektor, yakni: 11 proyek sektor jalan, 4 proyek sektor telekomunikasi dan informatika, 3 proyek sektor air minum, 1 proyek sektor transportasi, 2 proyek sektor ketenagalistrikan dan 1 proyek kawasan pariwisata dengan total nilai investasi Rp212,4 triliun. Nilai penjaminan yang diberikan Perseroan adalah Rp55,7 triliun, sehingga rasio nilai penjaminan terhadap ekuitas PT PII (*gearing ratio*) sebesar Rp10,97 triliun adalah 5,1x.

Dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp8 triliun kepada PT PII, sampai dengan tahun 2019 PT PII dapat mendorong percepatan pembangunan melalui penjaminan 22 proyek infrastruktur dengan nilai total investasi sebesar Rp212,4 triliun pada 6 sektor. Dengan demikian pemanfaatan (*leveraging*) PMN yang diberikan telah mencapai 26,5x yang menunjukkan indikator efektifitas pengelolaan PMN kepada PT PII dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

Adapun ringkasan proyek-proyek Penjaminan PT PII tersebut disajikan dalam tabel berikut.

No	Nama Proyek	Nilai Proyek (Rp Juta)	Tahapan Proyek	Financial Close
Infrastruktur Pembangkit Listrik				
1	Central Java Power Plant	61.455.916	Konstruksi	3-Jun-16
2	Hydropower Programme	6.568.048	Pra Konstruksi	5-Sep-19
Infrastruktur Telekomunikasi				
3	Palapa Ring Paket Barat	1.228.550	Operasi (2-Mar-18)	10-Nov-16
4	Palapa Ring Paket Tengah	1.093.399	Operasi (21-Dec-18)	29-Sep-16
5	Palapa Ring Paket Timur	5.087.881	Operasi (29-Aug-19)	29-Mar-17
6	Satelit Multi Fungsi	6.420.756	Pra Konstruksi	-
Infrastruktur Jalan				
7	Jalan Tol Batang Semarang	14.489.527	Operasi (14-Jan-19)	2-Apr-18
8	Jalan Tol Manado Bitung	5.123.287 (tidak termasuk dukungan konstruksi pemerintah)	Konstruksi	13-Sep-17
9	Jalan Tol Pandaan Malang	6.436.030	Operasi (Seksi 1-3: 10-Jun-19 & Seksi 4: 30-Okt-19)	13-Sep-17
10	Jalan Tol Balikpapan Samarinda	9.972.559 (tidak termasuk dukungan konstruksi pemerintah)	Operasi (Seksi 2-4a: 20-Dec-19, Seksi 4b: 31-Dec-19)	21-Dec-18

No	Nama Proyek	Nilai Proyek (Rp Juta)	Tahapan Proyek	Financial Close
11	Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated	16.233.409	Operasi (12-Des-19)	Turnkey Contract
12	Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan	8.408.685 (tidak termasuk dukungan konstruksi pemerintah)	Konstruksi	Turnkey Contract
13	Jalan Tol Krian Legundi Bunder Manyar	12.224.389	Konstruksi	Turnkey Contract
14	Jalan Tol Serang Panimbang	5.329.898 (tidak termasuk dukungan konstruksi pemerintah)	Konstruksi	Feb-19
15	Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi	23.391.192	Konstruksi	-
16	Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan	14.690.641	Konstruksi	Turnkey Contract
17	Jalan Tol Semarang Demak	5.440.789 (tidak termasuk dukungan konstruksi pemerintah)	Konstruksi	-
Infrastruktur Penyediaan Air Minum				
18	SPAM Umbulan	2.056.595 (tidak termasuk dukungan konstruksi pemerintah)	Konstruksi	10-Feb-17
19	SPAM Kota Bandar Lampung	750.000 (tidak termasuk dukungan konstruksi pemerintah)	Konstruksi	13-Agt-18
20	SPAM Semarang Barat	417.286	Konstruksi	22-Mei-19
Infrastruktur Pariwisata				
21	KEK Mandalika	4.583.236 ^{*)}	Pra Konstruksi	22-Mar-19
Infrastruktur Transportasi				
22	KA Makassar - Parepare	1.005.360	Pra Konstruksi	-

^{*)} Nilai proyek pada saat penandatanganan perjanjian penjaminan

Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi/Project Development Facility (PDF)

Sampai dengan tahun buku 2019, PT PII telah menerima penugasan pelaksanaan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi untuk 6 (enam) proyek, meliputi:

1. Pembangunan Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Riau yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
2. Pembangunan Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
3. Kereta Api Makassar - Parepare yang dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan RI
4. Pembangunan Rumah Sakit Kanker Dharmais yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI
5. Pembangunan Rumah Sakit Zainoel Abidin (Aceh) yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
6. Pembangunan Proyek Proving Ground Bekasi yang dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan RI

Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana dilakukan berpedoman pada ketentuan yang berlaku yaitu PMK Nomor 95/PMK.08/2017 dan Kebijakan Pengelolaan Dana yang ditetapkan secara internal oleh PT PII dalam bentuk Surat Keputusan Direksi.

Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah menempatkan dana pada sejumlah instrumen keuangan yang bervariasi berupa instrumen investasi di pasar keuangan, obligasi dan reksa dana, dengan senantiasa mempertimbangkan perkembangan kondisi pasar keuangan agar tercipta manajemen risiko yang baik dan perolehan pengembalian yang optimum.

KINERJA EKONOMI

Portofolio investasi Perusahaan sampai dengan Desember 2019 terdiri dari investasi atas deposito berjangka (70%) dan investasi atas pendapatan tetap (obligasi) (30%) dari total pengelolaan dana sebesar Rp10,9 triliun.

KEGIATAN PENDUKUNG USAHA

Kegiatan Korporasi

Secara rutin, Perseroan menyelenggarakan kegiatan operasional lain yang dikemas dalam bentuk *corporate event*, baik diselenggarakan secara mandiri maupun sebagai partisipan dalam kegiatan yang dilangsungkan oleh pemangku kepentingan lain yang relevan. Di tahun 2019, Perseroan menyelenggarakan 35 kegiatan korporasi yang relevan dengan mandat yang dijalankan.

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Perseroan senantiasa membina hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan eksternal juga menjadi prioritas kegiatan operasional Perseroan dalam menjaga keberlanjutan kegiatan usaha Perseroan. Di tahun 2019 Perseroan berpartisipasi pada 34 kegiatan yang diselenggarakan oleh pemangku kepentingan terkait di lingkup infrastruktur.

KINERJA KEUANGAN

Posisi Keuangan

PT PII berhasil membukukan aset pada tahun 2019 sebesar Rp11.111,24 miliar. Jumlah tersebut tumbuh 4,62% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp10.620,92 miliar. Sedangkan jumlah liabilitas selama tahun berjalan mencapai Rp139,46 miliar, turun 0,56% dari tahun sebelumnya sebesar Rp140,25 miliar, sedangkan ekuitas mencapai Rp10.971,78 miliar tumbuh 4,69% dari sebelumnya sebesar Rp10.480,67 miliar.

Ekuitas

Pada tahun 2019, posisi ekuitas Perseroan mencapai Rp10.971,78 miliar, tumbuh 4,69% atau sebesar Rp491,11 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp10.480,67 miliar. Komponen terbesar dari ekuitas adalah modal saham yang mencapai Rp8.000,00 miliar atau 72,91% dari total ekuitas.

Laba Rugi Komprehensif

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2019, total laba komprehensif Perseroan mencapai Rp646,57 miliar, naik secara signifikan sebesar 95,70% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai sebesar Rp330,38 miliar.

Laporan Arus Kas

Posisi kas dan setara kas pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp26,81 miliar, turun 98,42% atau sebesar Rp1.672,37 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp1.699,18 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya arus kas yang digunakan untuk investasi pengelolaan.

KONTRIBUSI EKONOMI DARI KEGIATAN USAHA

Kontribusi Tak Langsung

Kontribusi ekonomi dari kegiatan usaha Perseroan yang utama adalah berupa kontribusi ekonomi tak langsung dari kegiatan proyek, baik saat, maupun setelah selesainya proyek dimaksud. Ada berbagai kontribusi tak langsung dari kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan, mencakup: tumbuhnya kegiatan ekonomi di lokasi proyek, baik saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan proyek; meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD); meningkatnya efisiensi arus logistik, dan sebagainya.

Kontribusi Ekonomi Langsung dari Setoran Pajak

Ada dua jenis pajak yang dibayarkan oleh Perseroan sebagai wujud kontribusi ekonomi langsung terhadap negara, yakni Pajak Penghasilan Badan dan Setoran Pajak Penghasilan Karyawan. Sesuai Laporan Keuangan *Audited*, Beban Pajak Penghasilan Badan di tahun 2019 adalah sebesar Rp64,98 miliar dari Rp6,38 miliar di tahun 2018, sedangkan Pajak Penghasilan Karyawan yang dibayarkan adalah sebesar Rp21,48 miliar dari Rp17,25 miliar di tahun sebelumnya.

Uraian selengkapnya mengenai kinerja ekonomi Perseroan disampaikan pada Bab “Analisis dan Pembahasan Manajemen” dalam Laporan Tahunan 2019 PT PII.

MANFAAT EKONOMI DARI KEGIATAN USAHA PENJAMINAN SERTA KEGIATAN USAHA PENYIAPAN PROYEK DAN PENDAMPINGAN TRANSAKSI/PROJECT DEVELOPMENT FACILITY (PDF)

Selain memberi manfaat ekonomi langsung dari kegiatan operasional yang dijalankan, realisasi proyek-proyek infrastruktur yang mendapatkan penjaminan serta fasilitas PDF oleh PT PII memberikan dampak dan manfaat ekonomi yang besar baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan kegiatan ekonomi disekitar lokasi proyek, peningkatan efisiensi arus logistik dan membuka lapangan kerja.

Berbagai manfaat ekonomi dari beragam proyek tersebut selaras dengan pencapaian tujuan SDGs di bidang perekonomian, meliputi: SDGs ke-6 “Air Bersih dan Sanitasi”, SDGs ke-7 “Energi Bersih dan Terjangkau”, SDGs ke-8 “Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak dan SDGs ke-9 “Infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan”.

Dengan demikian, dengan PMN sebesar Rp8 triliun, PT PII dapat memberikan *multiplier effect* melalui percepatan pembangunan proyek infrastruktur yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional.

Berikut adalah ringkasan manfaat umum dan manfaat ekonomi dari realisasi proyek-proyek infrastruktur yang mendapatkan penjaminan dan PDF oleh PT PII.

No	Sektor Proyek	Nama Proyek	Keterangan Umum	Manfaat Umum	Manfaat dan Dampak Ekonomi
1	Ketenaga-listrikan	Central Java Power Plant	2 x 1.000 MW	<ul style="list-style-type: none"> Akses penerangan berbasis tenaga listrik. Mendukung peningkatan Rasio Elektrifikasi hingga sebesar 99,5% Memperbaiki rasio bauran energi pada proyek HPP Mengurangi tingkat kemiskinan (dari subsidi Pemerintah) 	<ul style="list-style-type: none"> Tambahan nilai ekonomi senilai Rp120 triliun. Mendukung pertumbuhan ekonomi.
2		Mini Hydropower - Lapai 1	2 x 2,656 KW		
3		Mini Hydropower - Kalibumi	3 x 2,115 KW		
4	Teleko-munikasi dan Informatika	Palapa Ring Paket Barat	1.711 Km Kabel Laut 427 Km Kabel Darat	<ul style="list-style-type: none"> Akses konektivitas data seluruh wilayah Indonesia Akses informasi dan komunikasi Manfaat jangka panjang bagi sektor pendidikan, kesehatan, <i>e-government</i> dan lingkungan. Menghubungkan 149.000 <i>service point</i> tanpa dukungan BTS pada SMF. 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai tambah ekonomi total Rp15 triliun dari seluruh proyek telekomunikasi. Penghematan anggaran belanja kertas dari <i>e-government</i> senilai Rp17 triliun per tahun dalam APBN. Penghematan biaya operasional dan pengembangan bisnis bagi sektor retail & pelayanan. Efisiensi pengelolaan <i>supply chain</i> bagi sektor manufaktur dan industri Penghematan biaya akses internet oleh pengguna
5		Palapa Ring Paket Tengah	1.797 Km Kabel Laut 1.289 Km Kabel Darat		
6		Palapa Ring Paket Timur	4.508 Km Kabel Laut 2.379 Km Kabel Darat		
7		Satelit Multi Fungsi (SMF)	150 GBps		

KINERJA EKONOMI

No	Sektor Proyek	Nama Proyek	Keterangan Umum	Manfaat Umum	Manfaat dan Dampak Ekonomi			
8	Jalan Tol	Batang - Semarang	75,00 km	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan aksesabilitas ke kawasan ekonomi, industri dan pariwisata. Melancarkan arus lalu lintas barang dan mobilitas orang Tol Semarang - Demak: mencegah banjir rob di kawasan Semarang, termasuk mencegah penyakit. 	<ul style="list-style-type: none"> Dari hasil analisis untuk Proyek Jalan Tol Pandaan - Malang, estimasi dampak ekonomi selama masa konsesi Proyek yaitu nilai tambah ekonomi sebesar Rp15 triliun. Nilai tambah ekonomi Rp511 miliar dari proyek non-tol. Penghematan nilai waktu perjalanan (<i>Value of Time</i>). Penghematan biaya operasional kendaraan (<i>Value of Vehicle</i>). 			
9		Manado - Bitung	39,90 Km					
10		Pandaan - Malang	38,49 km					
11		Balikipapan - Samarinda	99,35 km					
12		Jakarta - Cikampek II Elevated	36,40 km					
13		Cileunyi - Sumedang - Dawuan	60,10 km					
14		Krian - Legundi - Bunder - Manyar	38, 30 km					
15		Serang - Panimbang	83,70 km					
16		Probolinggo - Banyuwangi	172,90 km					
17		Jakarta - Cikampek II Selatan	64,00 km					
18		Semarang - Demak	27,00 km					
19		Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Riau dan Ruas Sumatera Selatan	29,87 km Proyek PDF					
20		Fasilitas Kesehatan	Pengembangan RS Kanker Dharmais			N.a Proyek PDF	<ul style="list-style-type: none"> Tambahan 3 rumah sakit berkualitas (0,22 % dari target rumah sakit terakreditasi pada periode 2015-2019) 	<ul style="list-style-type: none"> Tambahan nilai ekonomi sebesar Rp5,8 triliun.
21			Pengembangan RS Zainoel Abidin (Aceh)			N.a Proyek PDF		
22		Air Minum	SPAM Umbulan			4.000 ltr/dtk	<ul style="list-style-type: none"> Memasok ± 1,95 juta jiwa melalui ± 391.000 sambungan Meningkatkan prosentase ketersediaan air minum. Penghematan biaya dan waktu dalam memperoleh air minum Meningkatkan pasokan SPAM 55,44% dari target periode 2015-2019. 	<ul style="list-style-type: none"> Dari hasil analisis untuk Proyek SPAM Umbulan, estimasi dampak ekonomi selama masa konsesi Proyek yaitu nilai tambah ekonomi sebesar Rp3,5 triliun. Penghematan biaya kesehatan sebagai dampak dari peningkatan kualitas air
23			SPAM Kota Bandar Lampung			750 ltr/dtk		
24			SPAM Semarang Barat			1.000 ltr/dtk		
26		Perkereta Apian	KA Makassar Parepare			Fase 1 - 142 Km Penjaminan + PDF	<ul style="list-style-type: none"> Alternatif transportasi Penghematan Nilai Waktu Perjalanan 4,09% dari target pembangunan jalur KA 2015-2019. 	<ul style="list-style-type: none"> Tambahan nilai ekonomi sebesar Rp17,8 triliun. Penghematan Biaya Operasi Kendaraan.
27		Pariwisata	KEK Mandalika			N.a	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penyediaan beragam infrastruktur dasar. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Berkembangnya ekonomi berbasis pariwisata.
28	Transportasi	Proving Ground Bekasi	N.a Proyek PDF	Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar.	N.a			

Sumber:

- Laporan Analisis Dampak Ekonomi Tanggul Tol Semarang Demak (INDEF 2018)
- Feasibility Study masing-masing proyek.
- Project Dokumen for Mandalika Urban dan Tourism Infrastructure Project.
- Kajian Akhir Prastudi Kelayakan Satelit Multi Fungsi (2018)
- PPP and Government Guarantee To Strengthen SDGs In Indonesia, Annisa Nur Fauziah1, Yuki Mahardhito Adhitya Wardhana2

Disclaimer:

- * Kajian dibantu oleh LPEM FEB UI (2017) dan PUSTRAL UGM (2018)
- * Besaran hasil dampak ekonomi berantung pada:
 - cakupan wilayah proyek;
 - dasar tahun yang digunakan dalam penentuan asumsi;
 - lama masa konsesi proyek infrastruktur

04

Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Komunitas



MENDUKUNG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KOMUNITAS

PT PII melaksanakan CSR dengan merujuk pada empat pilar utama kegiatan yang menjadi target penting dalam aktivitas CSR Perseroan selain melaksanakan program donasi maupun sponsorship. Namun demikian yang utama adalah realisasi proyek berkat penjaminan yang diberikan selama ini turut menciptakan jutaan lapangan kerja baru bagi seluruh masyarakat.



Kegiatan penjaminan, sebagai bisnis utama yang dijalankan oleh PT PII sejatinya tidak melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat umum maupun komunitas sekitar. Justru realisasi Proyek yang mendapatkan penjaminan dari Perseroan yang melibatkan interaksi langsung, dan memberi dampak sosial saat pengerjaan tengah berlangsung, kemudian memberi manfaat sosial bagi masyarakat saat proyek selesai dikerjakan dan telah beroperasi.

Namun demikian, Perseroan tetap berkomitmen untuk menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial secara umum, khususnya pengembangan sosial kemasyarakatan. Bagi PT PII, pelaksanaan program dan kegiatan CSR Perseroan tidak hanya sekadar pemenuhan kewajiban, melainkan bentuk komitmen Perseroan untuk menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat dan lingkungan sekitar serta terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. PT PII menginginkan agar keberadaannya dapat membawa dampak positif yang berkesinambungan bagi masyarakat Indonesia dalam jangka panjang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selaras dengan visi Perseroan, untuk menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, PT PII berharap kehadirannya dapat berkontribusi terhadap bangsa dan negara Indonesia. PT PII meyakini implementasi CSR dalam jangka panjang akan memberikan banyak manfaat bagi PT PII, terutama pada aspek tumbuhnya kepercayaan, terciptanya keharmonisan dan meningkatkan reputasi yang pada akhirnya memiliki implikasi pada penciptaan nilai tambah yang mendorong kelancaran kestabilan dan pertumbuhan usaha Perseroan.

Oleh karenanya kami menguraikan pembahasan Bab "Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Komunitas" ini dalam dua bagian besar, yakni Program Sosial Kemasyarakatan PT PII dan Dampak Serta Manfaat Sosial Proyek-Proyek Penjaminan.

PROGRAM SOSIAL KEMASYARAKATAN PT PII

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
3. Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-003/BOD/CSC/0518 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Kebijakan

PT PII sangat menyadari bahwa keberadaannya merupakan bagian dari masyarakat, di mana pertumbuhan usaha yang diraih Perseroan juga tak lepas dari peran serta masyarakat. Untuk itu, Perusahaan pun memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan CSR yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat.

PT PII melaksanakan CSR dengan merujuk pada empat pilar utama kegiatan yang menjadi target penting dalam aktivitas CSR Perseroan, yaitu: Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Sosial dan Budaya, serta Lingkungan. Selain itu, di luar Empat Pilar Utama tersebut, PT PII juga melaksanakan program-program CSR lain seperti donasi dan partisipasi *sponsorship*. Hal ini merupakan wujud komitmen Perseroan dalam menjaga *relation* dan *engagement* dengan masyarakat, lingkungan maupun para pemangku kepentingan.

Tanggung jawab pengelolaan program CSR di PT PII dilakukan oleh Divisi *Corporate Secretary and Communication* yang berada di bawah pengawasan Direksi. Divisi *Corporate Secretary and Communication* menyusun program CSR yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan mitra kerja pihak ketiga, yaitu akademik, instansi pemerintah, lembaga kemanusiaan nasional dan lembaga sosial lokal sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas program.

Realisasi Program

Untuk tahun 2019 Perseroan secara kumulatif merealisasikan pelaksanaan berbagai program CSR dengan dukungan dana sebesar Rp1,38 miliar, realisasi alokasi penyaluran sebagai berikut:

No	Deskripsi Kegiatan CSR	Lokasi	Biaya
1	Program CSR Pembangunan Surau Al Quran Rumah Anak, Padang	Padang	25.000.000
2	Program CSR Dukungan Kegiatan Keagamaan di Pondok Pesantren	Tangerang Selatan	16.380.000
3	Program CSR Pembagian Paket Sembako untuk Masyarakat Tidak Mampu	Oku Timur	30.000.000
4	Program CSR Kegiatan Edukasi Jarak Jauh (<i>Teleteaching</i>) menghubungkan 3 kota, Jakarta-Natuna-Papua	Jakarta, Natuna, Papua	87.063.225
5	Kegiatan Berbagi Kebahagiaan Bulan Suci Ramadhan 1440 H/2019 M	Sesuai proposal	250.000.000
6	Donasi Hewan Qurban SMV Kementerian Keuangan, Idul Adha 1440 H	Jakarta	49.500.000
7	Program CSR Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Terkait Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika	Mandalika	199.638.000
8	Program CSR Pengembangan Kualitas Pendidik Tingkat SD-SMP Terkait Proyek KPBU Tol Jakarta-Cikampek II Selatan	Bekasi	199.268.060
9	Program CSR Pendidikan - Sinergi SMV & Kemenkeu dalam Program Kemenkeu Mengajar	Jakarta	125.654.000
10	Program CSR Kesehatan - Operasi Bibir Sumbing pada Masyarakat Tidak Mampu	Lampung	195.850.000
11	Program CSR Lingkungan - Membuat <i>Eco Brick</i>	Jakarta	200.000.000
Jumlah Biaya CSR Sosial dan Kemasyarakatan			1.378.353.285

MENDUKUNG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KOMUNITAS

DAMPAK SERTA MANFAAT SOSIAL PROYEK-PROYEK PENJAMINAN

Salah satu tujuan pembentukan PT PII adalah untuk meningkatkan kepastian bagi pihak swasta dalam berinvestasi di proyek infrastruktur, yang pada akhirnya diharapkan dapat turut mempercepat penyediaan infrastruktur, memperbaiki iklim investasi, meningkatkan daya saing nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Melalui penjaminan yang diberikan, proyek-proyek infrastruktur tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat dan dampak positif terhadap ekonomi dan sosial.

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan telah memberikan penjaminan terhadap 22 proyek infrastruktur baik yang berskema KPBU maupun Non-KPBU serta penyiapan dan pendampingan transaksi untuk 6 proyek KPBU. Sesuai hasil analisis yang dilaksanakan, masing-masing proyek memberikan manfaat dan dampak sosial yang beragam selaras dengan karakteristik sektor, besaran investasi maupun tujuan utama dari realisasi proyek dimaksud. Salah satu dampak sosial utama adalah terbukanya lapangan pekerjaan dan berbagai manfaat sosial lain, mencakup meningkatnya kelengkapan infrastruktur dasar, terpenuhinya kebutuhan air minum, terjaganya kesehatan dan lain-lain.

Proyek infrastruktur KPBU juga memiliki peran dalam mendukung tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada bidang sosial, yakni: **SDGs ke-1** “Tidak ada kemiskinan di seluruh tingkatan”, **SDGs ke-3** “Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan”, **SDGs ke-6** “Air Bersih dan Sanitasi” dan **SDGs ke-8** “Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak”.

Berikut rekapitulasi manfaat sosial dari berbagai proyek infrastruktur yang mendapatkan penjaminan dan PDF oleh PT PII.

No	Sektor Proyek	Estimasi Manfaat Sosial	Kontribusi SDGs bidang Sosial
1.	Ketenagalistrikan • PLTU Central Java 2x1000 MW • 2 Proyek HPP	<ul style="list-style-type: none"> Akses penerangan berbasis tenaga listrik Mengurangi tingkat kemiskinan (dari subsidi Pemerintah) 	<p>Mendukung pencapaian SDGs ke-1 "Tidak ada kemiskinan di seluruh tingkatan"</p> <p>Mendukung pencapaian SDGs ke-8 "Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak"</p>
2.	Telekomunikasi • Palapa Ring 3 Paket (8.479 km kabel optik) • Satelit Multifungsi (menghubungkan 149.400 titik layanan <i>offline</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan konektivitas data Peningkatan akses informasi dan komunikasi Manfaat jangka panjang bagi sektor pendidikan, kesehatan, <i>e-Government</i> dan lingkungan 	Mendukung pencapaian SDGs ke-8 "Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak"
3.	Jalan • Jalan Tol - 11 Ruas Tol (total 745,01 km) • Jalan Non Tol - Preservasi 2 ruas Jalan Nasional (29,87 km)	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas ke kawasan ekonomi, industri dan pariwisata. Melancarkan arus lalu lintas barang dan mobilitas orang Mencegah banjir bob di Kawasan Semarang Utara sepanjang jalur Tol Semarang-Demak. Mencegah penyakit pada ruas jalan tol Semarang-Demak. 	<p>Mendukung pencapaian SDGs ke-1 "Tidak ada kemiskinan di seluruh tingkatan"</p> <p>Mendukung pencapaian SDGs ke-8 "Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak"</p>
4.	Sektor Kesehatan - 2 Proyek RS yang mendapatkan pendampingan PDF PT PII	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fasilitas kesehatan Menyelamatkan nyawa pasien Mempercepat kesembuhan pasien 	<p>Mendukung pencapaian SDGs ke-3 "Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan".</p> <p>Mendukung pencapaian SDGs ke-8 "Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak"</p>
5.	Sektor Air Minum - 3 Proyek SPAM	<ul style="list-style-type: none"> Memasok + 1,95 juta jiwa melalui + 391.000 sambungan Meningkatkan prosentase ketersediaan air minum. Penghematan biaya dan waktu dalam memperoleh air minum 	<p>Mendukung pencapaian SDGs ke-6 "Air Bersih dan Sanitasi".</p> <p>Mendukung pencapaian SDGs ke-8 "Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak"</p>
6.	Perkeretaapian - KA Makassar-Parepare	<ul style="list-style-type: none"> Penghemataan Nilai Waktu Perjalanan Alternatif transportasi 	Mendukung pencapaian SDGs ke-8 "Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak"
7.	Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata - Mandalika - Lombok Nusa Tenggara Barat	<ul style="list-style-type: none"> Berbagai kelengkapan infrastruktur dasar. Peningkatan kualitas hidup masyarakat. 	Mendukung pencapaian SDGs ke-8 "Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak"
8.	Proving Ground Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya kelengkapan infrastruktur dasar di bidang perhubungan 	N/A

Sumber :

- Laporan Analisis Dampak Ekonomi Tanggul Tol Semarang Demak (INDEF 2018)
- Project Document for Mandalika Urban dan Tourism Infrastructure Project*
- Kajian Akhir Prastudi Kelayakan Satelit Multi Fungsi (2018)
- Feasibility Study* masing-masing proyek.

Disclaimer

- * Kajian dibantu oleh LPEM FEB UI (2017) dan PUSTRAL UGM (2018)
- * Besaran hasil dampak ekonomi berantung pada:
 - cakupan wilayah proyek;
 - dasar tahun yang digunakan dalam penentuan asumsi;
 - lama masa konsesi proyek infrastruktur



05 

Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PT PII melaksanakan pengembangan SDM baik di lingkup internal maupun di luar perusahaan melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai penyediaan proyek infrastruktur guna mendukung pengembangan ekosistem infrastruktur.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (“PT PII”) meyakini bahwa Sumber Daya Manusia (“SDM”) yang andal dan mumpuni mampu memberikan kontribusi penting bagi kinerja dan kesinambungan Perseroan. Kehadiran SDM yang profesional dan kompeten akan membuat Perseroan mampu mewujudkan visi dan misi serta rencana kerja berkelanjutan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang hal tersebut, Perseroan senantiasa memastikan SDM diperlakukan secara adil dan menghargai setiap kontribusi yang diberikan tanpa memandang perbedaan gender maupun ras. Strategi dan pengelolaan SDM di lingkungan Perseroan terutama mengacu pada ketentuan yang ada, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pengelolaan SDM di lingkungan PT PII berada di bawah Divisi Human Capital. Penyempurnaan dan pembaharuan kebijakan secara berkala dilaksanakan oleh Divisi Human Capital guna optimalisasi pelaksanaan praktik ketenagakerjaan sepanjang siklus kepegawaian.

Komitmen Pemberian Kesempatan yang Sama kepada Seluruh Karyawan

PT PII senantiasa menjunjung tinggi persamaan hak para karyawan tanpa memandang perbedaan gender, suku, agama, serta perbedaan lainnya. PT PII memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan, untuk dinilai kinerjanya serta untuk mendapatkan jenjang karir maupun remunerasi yang seimbang dengan kompetensi dan kinerjanya.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

PT PII selalu berupaya menciptakan suasana kerja yang terbuka, positif dan progresif untuk menciptakan hubungan industrial yang sehat dan harmonis. Untuk itu, PT PII senantiasa melibatkan karyawannya dalam memutuskan kebijakan-kebijakan menyangkut ketenagakerjaan, yang dilakukan melalui diskusi dan penyampaian pendapat oleh perwakilan karyawan. Pendekatan lain yang dilakukan adalah dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam bentuk *townhall meeting* yang melibatkan seluruh karyawan atau *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan *Senior Leaders*.

KINERJA PENGELOLAAN SDM

Di tahun 2019, Perseroan merealisasikan beberapa program utama dalam pengelolaan SDM. Pertama, internalisasi nilai budaya Perusahaan yang dikenal sebagai InTIME (*Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust* dan *Excellence*) melalui program budaya. Program ini merupakan program lanjutan dari pelaksanaan Revitalisasi nilai-nilai budaya yang dilakukan di tahun 2018.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kedua, Perseroan menjalankan program #PIIHealthy2019. Program ini terdiri dari penyediaan fasilitas klinik Kesehatan karyawan yang berfungsi sebagai sarana konsultasi Kesehatan serta pemantauan *improvement* kesehatan karyawan secara menyeluruh, lengkap dengan penyelenggaraan kegiatan olahraga dan program *Medical Check Up* (MCU).

Ketiga, melaksanakan *review* tengah tahun atas pencapaian kinerja seluruh karyawan. Dan keempat, Divisi Human Capital kembali menyelenggarakan program pelatihan *Coaching* untuk *Senior Leader*.

PENGELOLAAN SDM

Perseroan mengelola sumber daya manusia melalui Divisi Human Capital dengan fokus terhadap 4 area, yaitu:

- *HR Operation* - Fungsi dari *HR Operation* di antaranya meliputi fungsi administratif dan *employee relation management*.
- *Payroll* - *Payroll* berperan besar dalam remunerasi karyawan serta benefit kesejahteraan karyawan lainnya.
- Rekrutmen - Kegiatan untuk mendapatkan SDM yang berkompeten dengan tepat, akurat dan cepat
- *Strategy & Culture* - Penyelarasan perkembangan bisnis Perusahaan dengan pengembangan SDM, termasuk pengembangan budaya Perusahaan.

REKRUTMEN

PT PII menerapkan asas kesamaan kesempatan dan keterbukaan dalam proses rekrutmen dan seleksi. Selama tahun 2019, Perseroan telah merekrut 21 (dua puluh satu) karyawan baru, baik yang berstatus *pro-hire* maupun *fresh graduates*, yang kemudian ditempatkan di sejumlah divisi Perseroan.

Selain merekrut karyawan baru, di tahun 2019, Perseroan juga memproses pengakhiran hubungan kerja terhadap 9 (sembilan) orang karyawan, sehingga tingkat *turnover* pada tahun 2019 adalah sebesar 6,8%. Angka ini menurun dari 7,6% di tahun sebelumnya.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pengembangan kompetensi karyawan merupakan bagian dari strategi dan upaya untuk mencapai target usaha yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Metode yang diterapkan beragam, yakni: melalui pelatihan dan *workshop*, baik secara internal maupun secara eksternal bekerja sama dengan lembaga pendidikan; *knowledge sharing* dan *public training*.

Di tahun 2019, PT PII merealisasikan total 98 paket pelatihan, yakni *inhouse training* 11 kali, *knowledge sharing* 6 kali dan *public training* 81 kali, dengan total peserta adalah 971 peserta, atau berarti rata-rata karyawan mengikuti 9 program pelatihan. Materi pelatihan bervariasi untuk meningkatkan kemampuan teknis maupun *softskill*, mulai dari kompetensi dasar, pelatihan di bidang penjaminan, pola pembangunan proyek PPP, pengetahuan di bidang infrastruktur, pemantauan proyek, dan subyek pelatihan lain yang relevan dengan kegiatan perusahaan.

Adapun total investasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dikeluarkan adalah sebesar Rp3,64 miliar.

MANAJEMEN KINERJA

Penilaian kinerja masing-masing individu karyawan dilaksanakan secara objektif, berjenjang, periodik dan transparan. Proses evaluasi kinerja dilakukan secara berkala menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) berbasis *Balanced Score Card* (BSC) atau lebih dikenal dengan istilah BSC KPI.

PT PII melakukan evaluasi kinerja tengah tahun dan akhir tahun untuk setiap individu di setiap level jabatan sebagai bentuk *monitoring* terhadap pencapaian kinerja individu, divisi dan perusahaan. Evaluasi tersebut bagi karyawan juga diharapkan dapat menjadi media diskusi kinerja masing-masing individu dengan penanggung jawabnya untuk memastikan proses pengembangan karir yang konsisten dan merata kepada seluruh karyawan. Tindak lanjut penilaian kinerja dan kompetensi adalah perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan, rotasi, mutasi serta promosi bagi karyawan.

REMUNERASI DAN KESEJAHTERAAN

Paket remunerasi Perseroan disusun dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Perseroan juga melakukan *benchmark* dengan organisasi sejenis lainnya secara berkala, sehingga didapat struktur remunerasi yang kompetitif di pasar tenaga kerja, namun juga sesuai dengan kemampuan perusahaan. Perseroan juga memastikan bahwa besaran remunerasi untuk karyawan baru pada level terendah akan sama, bahkan lebih besar dari ketentuan Upah Minimum Regional.

Adapun komponen remunerasi Perseroan terdiri dari: Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi dan Tunjangan Transportasi. Selain itu karyawan juga mendapatkan tunjangan lain seperti Tunjangan Cuti, Tunjangan Pakaian dan Tunjangan Hari Raya.

Selain komponen remunerasi tersebut, Perseroan juga menyediakan paket kesejahteraan, meliputi:

1. Kepesertaan jaminan sosial BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas kesehatan serta asuransi.
2. Program peningkatan jenjang pendidikan maupun dukungan pada kebutuhan karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya
3. Dukungan pelaksanaan kegiatan olah raga.
4. Bantuan bagi karyawan yang mengalami duka cita.
5. Fasilitas *soft loan* bagi karyawan.
6. Dan lain-lain

Secara keseluruhan paket remunerasi PT PII sudah cukup bersaing dan lebih baik dari ketentuan perundangan yang berlaku. Sebagai gambaran, upah dari pegawai baru di level terendah Perusahaan di tahun 2019 adalah sekitar Rp5.509.874,- atau sekitar 39,81% di atas UMR DKI yang sebesar Rp3.940.973,-.

Program Pensiun

Perseroan juga melaksanakan program jaminan hari tua berupa Jaminan Pensiun serta Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan dan DPLK. Bagi karyawan yang telah berusia 55 tahun dapat mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan karyawan yang telah memasuki usia purnabakti (56 tahun), diberikan kompensasi sesuai peraturan.

SURVEI KEPUASAN KARYAWAN

Untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan pengelolaan sumber daya manusia, secara berkala Perseroan melakukan survei kepuasan karyawan. Untuk tahun 2019, survei dilaksanakan secara *online* pada tanggal 13-17 Januari 2020 bekerjasama dengan PT Binar Consulting (BRIGHT). Berdasarkan hasil survei tersebut rata-rata tingkat kepentingan dari tiap aspek adalah 4,45 yang membuktikan bahwa dari setiap komponen yang diukur dianggap penting oleh partisipan dan rata-rata tingkat kepuasan dari tiap aspek adalah 3,84 atau dapat dikategorikan Puas. Dengan hasil tersebut maka Perseroan telah mendukung pencapaian tujuan ke 8 - Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak dari rumusan Sustainable Development Goals (SDGs).

DEMOGRAFI KARYAWAN

Hingga periode 31 Desember 2019, jumlah karyawan PT PII adalah sebanyak 132 orang naik 3,13% dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak 128 orang. Dengan komposisi sebanyak 111 orang merupakan karyawan tetap dan sebanyak 21 karyawan tidak tetap. Jumlah karyawan laki-laki Perseroan adalah 73 (55,3%) orang dan karyawan perempuan adalah 59 (44,7%) orang. Dari sisi pendidikan, mayoritas karyawan Perseroan memiliki jenjang pendidikan Sarjana (53,7%), Pasca Sarjana (38,6%), hingga Doctoral.

Demografi karyawan tersebut menunjukkan bahwa sistem rekrutmen yang diselenggarakan telah menjunjung tinggi asas kesetaraan dan kesempatan kerja dengan tidak membedakan pria dan wanita.

LINGKUNGAN KERJA

PT PII menunjukkan komitmennya dalam menciptakan kondisi lingkungan kerja yang layak, aman dan berkeadilan dengan senantiasa menghormati dan memenuhi hak-hak para karyawan, menyelesaikan seluruh keluhan karyawan, menerapkan penilaian kinerja serta menetapkan jenjang karir serta paket remunerasi yang adil, *fair*, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. PT PII juga memegang teguh komitmennya untuk melarang adanya kerja paksa dan tenaga kerja anak di seluruh pembangunan proyek yang didukung.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



PENGEMBANGAN EKOSISTEM INFRASTRUKTUR

Selain mengembangkan SDM di lingkup internal Perusahaan, PT PII juga aktif mengembangkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penjaminan proyek infrastruktur dan seluk beluk inisiasi, pendanaan dan realisasi proyek infrastruktur kepada berbagai kelompok *stakeholders*, terutama di lingkup Pemerintah Daerah dan para mitra kerja. Berikut ringkasan inisiatif yang dilaksanakan PT PII dalam mengembangkan pemahaman SDM di luar perusahaan mengenai seluk-beluk proyek-proyek infrastruktur, termasuk fungsi penjaminan yang dijalankan.

Capacity Building Stakeholder

Guna menunjang pengembangan bisnis sekaligus memberikan edukasi kepada pihak terkait, PT PII melalui IIGF Institute hadir untuk membangun sistem serta menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas (*Capacity Building*) secara berkala melalui program *General Active Learning Program* (GALP). Program ini difokuskan pada pembelajaran pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar penyediaan infrastruktur serta meningkatkan pemahaman tentang penyediaan Infrastruktur dengan skema KPBU.

Pada pelaksanaan kegiatan *Capacity Building*, IIGF Institute bekerjasama dengan Divisi Pengembangan Bisnis serta Divisi Guidance and Consultation yang memegang peran penting sebagai fungsi terdepan dalam berhubungan dengan calon PJPK. Selain itu IIGF Institute juga bekerjasama dengan pihak eksternal di antaranya Kantor Bersama KPBU dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas serta mitra akademik nasional maupun daerah yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan proyek yang direncanakan.

Kegiatan *Capacity Building* utamanya diberikan kepada PJPK dengan proyek yang masih berada dalam tahapan awal, baik perencanaan maupun penyiapan, guna memperlancar proses pelaksanaan proyek ke depannya. Pelaksanaan kegiatan ini akan menjamin mutu kualitas SDM yang baik dalam mengimplementasikan skema KPBU, sehingga akselerasi penyediaan infrastruktur dapat lebih mudah diwujudkan.

Sepanjang tahun 2019, Perseroan melaksanakan 29 program GALP dalam rangka *capacity building*. Para peserta pada program GALP ini umumnya adalah utusan dari Pemerintah Daerah/Kota di berbagai potensial proyek infrastruktur dan utusan dari Kementerian terkait. Daftar Peserta GALP dapat dijumpai di uraian “Kegiatan Pendukung Usaha” pada Laporan Tahunan PT PII.

Sertifikasi Training

Sejak tahun 2017 PT PII melalui IIGF Institute juga telah berproses untuk menjadi *Accredited Training Organization* (ATO), dan secara resmi pada 19 September 2019 telah berhasil menjadi Certification PPP Profesional (CP3P) ATO untuk level foundation. Sebagai ATO Accrediting Professional Manager Globally (APMG), PT PII telah memiliki 4 (empat) orang Certified Trainer, 32 orang CP3P *Level Foundation* dan 2 orang CP3P *Level Preparation*.

Riset dan Publikasi

Selain kegiatan *Capacity Building*, IIGF Institute juga memiliki *stream Research and Publication*. *Research* ini sendiri dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu pengembangan KPBU dan *Project Based*. Hasil *research project base* yang telah diselesaikan oleh IIGF Institute meliputi:

- Kajian Sektor Perkeretaapian
- Kajian Sektor Rumah Sakit
- Kajian Sektor Air Limbah
- Dokumen Penyiapan Proyek Jogja Agro Techno Park
- Dokumen Penyiapan Proyek Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto

Sementara untuk kategori kajian pengembangan KPBU terdiri dari *Critical Success Factor* Pembangunan Proyek Infrastruktur Air Minum dengan skema KPBU dan Kajian Kemampuan Investasi BUMN. Selanjutnya, terkait dengan *stream Publication* IIGF Institute telah mempublikasikan *Journal of Infrastructure Policy and Management* (JIPM) Vol.2 pada bulan November 2019, Laporan *Riset Critical Success Factor* Pembangunan Proyek Infrastruktur Air Minum dengan skema KPBU, *Glossarium* KPBU Edisi 2 dan *Policy Brief* Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) untuk kegiatan IIR 13 - 19.

University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID)

Dalam usahanya membangun ekosistem pembangunan infrastruktur yang lebih baik, PT PII melalui IIGF Institute membentuk Jaringan Kerja antar Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Infrastruktur (JPPI) atau University Network for Infrastructure Development (UNIID) Pada 16 Desember 2015, sebagai suatu wadah bagi para akademisi untuk

saling bertukar informasi dan berbagi pengalaman serta berkontribusi dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan inovasi mendorong percepatan penyediaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hingga saat ini, telah terdapat 34 (tiga puluh empat) perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan PT PII dan tergabung dalam UNIID.

1. Universitas Syiah Kuala
2. Universitas Sumatra Utara
3. Universitas Sriwijaya
4. Poltek Batam
5. Universitas Andalas
6. Universitas Bengkulu
7. Universitas Lampung
8. Universitas Lambung Mangkurat
9. Universitas Tanjung Pura
10. Universitas Mulawarman
11. Universitas Indonesia
12. Institut Teknologi Bandung
13. Universitas Padjadjaran
14. Institut Pertanian Bogor
15. Universitas Gadjah Mada
16. Universitas Sebelas Maret
17. Universitas Diponegoro
18. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
19. Universitas Airlangga
20. Universitas Brawijaya
21. Universitas Udayana
22. Universitas Nusa Cendana
23. Universitas Hasanuddin
24. Universitas Tadulako
25. Universitas Haluo Oleo
26. Universitas Negeri Gorontalo
27. Universitas Sam Ratulangi
28. Universitas Khairun
29. Universitas Pattimura
30. Universitas Cenderawasih
31. Universitas Trilogi
32. Universitas Pancasila
33. Universitas Prasetya Mulya
34. Sekolah Tinggi Akutansi Negara

Pada tahun 2019 PT PII bersama UNIID menyelenggarakan kegiatan:

- Infrastructure Summit 2019 dengan tema "Empowering University for Continuous PPP Infrastructure Development in Regional Government"

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Simposium ke - 4 UNIID dengan tema “Penyiapan Proyek Infrastruktur dan Pengembangan SDM di Bidang Infrastruktur dengan Skema KPBU”
- Indonesia Infrastructure Roundtable ke-19 dengan tema “Prospek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Sektor Perumahan, Studi Kasus: Apartemen Rakyat (Rumah Susun Sewa) di Kota Bandung”
- Indonesia Infrastructure Roundtable ke-20 dengan tema “Optimalisasi Strategi dan Alternatif Skema Pembiayaan KPBU dalam Proyek Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan: Studi Kasus TPST Regional Piyungan”

Kegiatan-kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dari anggota-anggota UNIID, mendorong proses penyediaan infrastruktur serta memberikan usulan kepada Pemerintah dalam bentuk *policy brief* sebagai bentuk nyata dari kontribusi anggota UNIID pada pembangunan infrastruktur di Indonesia.

ASPEK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Komitmen dan Kebijakan

Perseroan menempatkan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagai hal penting dalam kegiatan operasional perusahaan yang dapat mendorong produktivitas, serta peningkatan kualitas hidup, baik bagi karyawan maupun seluruh pemangku kepentingan.

Dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan berkomitmen untuk melakukan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang difokuskan untuk mencapai tingkat kecelakaan nihil atau *zero accident*. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT PII mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Target Kegiatan

Dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan menargetkan pelaksanaan kegiatan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan sebagai prioritas utama.

Realisasi

Dalam peraturan perundangan terkait aspek K3, telah diatur mengenai sistem manajemen perusahaan dalam pengendalian risiko kegiatan kerja, termasuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Peraturan ini diharapkan membantu terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Kesehatan dan Keselamatan kerja merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi prioritas utama dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, oleh karena itu penting bagi seluruh karyawan untuk memahami risiko dan bagaimana mengantisipasi potensi bahaya.

Untuk mencapai target *zero accident*, Perseroan memiliki dan menjalankan Standar Operasional Prosedur Siaga Tanggap Darurat (SOP) yang digunakan sebagai panduan dalam rangka meningkatkan perlindungan Insan Perusahaan dalam situasi Siaga Tanggap Darurat di Lingkungan Perseroan.

SOP tersebut juga menjelaskan proses pelaporan keadaan darurat, proses evakuasi serta jenis-jenis keadaan darurat. Adapun jenis-jenis keadaan darurat yang terakup dalam SOP tersebut antara lain meliputi keadaan gempa, kerusakan atau gangguan sipil, kebakaran, kegagalan ventilasi, proses evakuasi gedung, serta keadaan darurat lainnya.

Dampak Kegiatan

Pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan secara konsisten di lingkungan Perseroan membuahkan hasil. Sepanjang tahun 2019, tidak ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja maupun terjangkit penyakit serius di tempat kerja.

The background of the entire page is a photograph of a lush green hillside. In the foreground and middle ground, there are dense clusters of trees, some with bright yellow-green foliage. In the background, two large white wind turbines are visible against a cloudy sky. A green rounded rectangular overlay is positioned in the upper right corner, containing white text and a logo.

06



Mendorong
Realisasi
Pembangunan
Infrastruktur
Ramah Lingkungan

MENDORONG REALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN

Sekalipun kegiatan operasionalnya tidak berdampak substansial terhadap lingkungan, PT PII tetap berkomitmen untuk berkontribusi terhadap upaya perbaikan kualitas lingkungan dengan menerapkan kebijakan dan inisiatif operasional berwawasan lingkungan dan menerapkan kebijakan penjaminan berbasis lingkungan. Penjaminan proyek berbasis lingkungan dilaksanakan dengan menerapkan metode penapisan dan mitigasi risiko lingkungan berstandar Bank Dunia, serta mensyaratkan pemantauan berkala kepatuhan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Kegiatan operasional penjaminan PT PII sejatinya tidak memberikan dampak substansial terhadap lingkungan, dibandingkan dengan kegiatan manufaktur, pertambangan maupun transportasi. Namun demikian, Perseroan tetap berkomitmen untuk menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan dan inisiatif yang berwawasan lingkungan, dan penerapan kebijakan penjaminan berbasis lingkungan dan sosial.

Kebijakan Perseroan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dimulai dari internal PT PII. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan Peraturan Perusahaan dalam rangka meminimalisasi dampak negatif operasional Perusahaan terhadap lingkungan hidup.

Sebagai bentuk komitmen kepedulian PT PII terhadap lingkungan hidup, Perseroan melakukan penilaian atas pemenuhan prinsip-prinsip lingkungan dan sosial terhadap proyek yang akan dijamin, yang tertuang dalam Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial, yaitu:

- Penilaian Lingkungan dan Sosial
- Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
- Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi
- Kesehatan dan Keamanan Masyarakat
- Pengadaan Tanah dan Pemindahan Terpaksa
- Perlindungan Keragaman Hayati
- Warisan Budaya
- Masyarakat Adat

Tujuan dari Kebijakan Lingkungan dan Sosial tersebut adalah memastikan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) memenuhi seluruh Peraturan dan perundang-undangan Pemerintah Indonesia terkait perlindungan lingkungan dan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja dan menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga risiko lingkungan dan sosial dapat dinilai, diukur, dipantau, dan dimitigasi secara memadai. Proyek dimaksud diharapkan memberi dampak minimal bagi menurunnya kualitas lingkungan saat pembangunannya, berkat dilakukannya mitigasi dampak lingkungan. Dan sebaliknya memberi manfaat terhadap perbaikan kualitas lingkungan secara optimal saat proyek sudah operasional.



Tujuan akhirnya adalah mendukung upaya Pemerintah Indonesia memenuhi komitmen perbaikan kualitas lingkungan terkait emisi nasional yang disampaikan dalam Cooperation of Parties (COP-24). Dalam COP-24 tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan telah bertekad mengurangi kadar emisi CO₂ hingga sebesar 29% dengan upaya sendiri, atau hingga 41% jika mendapatkan bantuan internasional di tahun 2030 mendatang, dengan menggunakan *baseline* emisi 2030 bisnis *as usual* sebagai standar. Oleh karena penanganan isu lingkungan dan cuaca ekstrim ini memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, Perseroan sebagai salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan, bertekad berpartisipasi untuk menjaga kelestarian lingkungan.

TARGET KEGIATAN

Target pelaksanaan CSR Perseroan bidang lingkungan hidup pada tahun 2019 antara lain menjalankan kebijakan lingkungan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan internal Perseroan. Di samping itu, berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan, Perseroan menargetkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan bisnis yang dapat mendorong keberlanjutan usaha, di antaranya melalui pelaksanaan efisiensi serta kegiatan operasional ramah lingkungan.

MENDORONG REALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN

Kegiatan yang Dilakukan

Untuk menunjukkan komitmen dukungan bagi pencapaian tujuan keberlanjutan di bidang lingkungan dari aktivitas operasional, Perseroan merealisasikan berbagai kegiatan terkait, yakni:

1. Program Hemat Kertas dengan Memaksimalkan Penggunaan e-mail (Soft Copy)

PT PII terus mengurangi intensitas penggunaan kertas dengan memaksimalkan penggunaan e-mail (soft copy) dalam setiap bentuk komunikasi antar unit kerja di lingkungan Perseroan. Dengan program ini, diharapkan tercipta budaya *paperless* di lingkungan Perseroan.

2. Penggunaan Kertas Bekas ataupun Melaksanakan Cetak Bolak-balik

Dengan program ini diharapkan dapat meminimalisir kegiatan untuk melakukan pencetakan. Pencetakan menggunakan kertas hanya dilakukan bila hal tersebut sudah dianggap final, sementara hal-hal yang masih bersifat *draft*, pencetakan dilakukan menggunakan cetak bolak-balik.

3. Penghematan Listrik dan Air

PT PII mengimbau untuk melakukan penghematan listrik dengan melakukan sosialisasi dan anjuran untuk mematikan lampu dan listrik apabila tidak terpakai. Begitu pun dengan pemakaian air diharapkan untuk tidak boros dalam penggunaannya.

4. Pengurangan Penggunaan Plastik

PT PII secara berkelanjutan meneruskan kebiasaan baik yaitu mengganti botol air minum dalam kemasan yang sebelumnya dibagikan ke meja karyawan dengan beralih menggunakan botol *tumbler*.

5. Pelatihan Kesadaran Peduli dan Mencintai Kebersihan

PT PII memberikan pelatihan tentang pentingnya membuang sampah sembarangan di beberapa tempat yang terletak dekat dengan proyek pembangunan yang dijamin Perseroan. Selain itu PT PII juga melakukan penanaman bibit pohon yang berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman.

6. Pembuatan Eco Brick

PT PII telah melaksanakan kegiatan dalam Program Membuat *Eco Brick* dengan melibatkan target peserta sebanyak seribu (1.000) pelajar SD yang tersebar pada tiga sekolah di Jakarta Selatan dengan tujuan mendidik anak-anak peserta sekolah dasar (SD) menanamkan kebiasaan baik mencintai lingkungan dimulai usia dini serta memberikan edukasi tentang lingkungan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dengan salah satu solusinya mengurangi sampah plastik, yaitu dengan mengolah limbah plastik menjadi *eco brick* sekaligus mengurangi risiko bencana.

PENERAPAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DALAM PENJAMINAN PROYEK

PT PII berperan dalam penanganan isu lingkungan dan sosial di level proyek pada forum Tim Pemantauan Bersama/*Joint Monitoring Committee* yang membantu para *stakeholder* dalam merumuskan solusi atas isu atau kendala proyek, termasuk isu-isu lingkungan. Salah satu mekanisme dalam pengelolaan risiko lingkungan dan sosial adalah melakukan pemantauan risiko dengan *tools RMR* dan *Key Risk Indicator (KRI)*.

1. PT PII berkomitmen mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam menjalankan bisnisnya, dimana salah satu pertimbangan dalam pemberian penjaminan adalah kelayakan aspek lingkungan dan sosial.
2. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan menyusun Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial sebagai pedoman untuk memastikan penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur telah mengelola risiko-risiko lingkungan dan sosial dengan tepat. Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia dan *best practice* yang ada dan dilakukan *review* secara berkala. Oleh sebab itu, *review* terhadap pemenuhan regulasi lingkungan hidup telah dilakukan secara berkala untuk memastikan proses bisnis telah memenuhi regulasi yang berlaku.

PT PII memastikan penjaminan yang diberikan terhadap proyek infrastruktur telah memenuhi Prinsip Penilaian Lingkungan dan Sosial yang disusun dengan merujuk pada standar terbaik yang berlaku secara internasional, dengan dilakukan beberapa penyesuaian sesuai kondisi di tanah air dan selaras dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kriteria dimaksud mencakup:

- Penapisan dan kategorisasi proyek
- Penilaian lingkungan dan sosial
- Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- Kapasitas Penanggung Jawab Proyek
- Keterlibatan pemangku kepentingan (*Stakeholder*)
- Pengelolaan Keluhan
- Pelaporan

Selain itu, PT PII memastikan proyek yang akan dijamin memenuhi aspek ketenagakerjaan dan keselamatan kerja dengan memastikan PJKP dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) menerapkan sistem yang memadai dan berkomitmen untuk:

- Mengedepankan perlakuan adil, non-diskriminasi, dan kesempatan yang sama untuk seluruh tenaga kerja;
- Mencegah pekerja anak, pekerja paksa, dan pekerja migran yang melanggar peraturan Pemerintah Indonesia;
- Mengedepankan kondisi dan praktik kerja yang aman dan sehat bagi pekerja dan lingkungan sekitarnya.

PT PII dalam rangka mencegah penurunan kualitas lingkungan akibat proyek infrastruktur yang akan dibangun menerapkan prinsip “Efisiensi Sumberdaya dan Pencegahan Polusi”. Hal itu dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komitmen PJKP dan tools yang dibangun untuk memastikan bahwa proyek tersebut dapat melakukan:

- Pencegahan polusi dan mengelola dampak yang timbul dari proyek infrastruktur yang akan mendapatkan penjaminan;
- Menerapkan standar yang ada dalam penerapan praktik usaha yang memenuhi aspek perlindungan dan sosial;
- Komitmen dalam penggunaan sumber daya yang bersifat berkelanjutan.

Dampak rangka memastikan proyek infrastruktur yang mendapatkan penjaminan berkomitmen dalam perlindungan keragaman hayati jika berada di sekitar kawasan lindung dan berdampak nyata, maka PT PII akan memastikan komitmen PJKP dan Badan Usaha Pelaksana dan tools yang memadai agar proyek tersebut dapat memenuhi hal sebagai berikut:

- Memastikan proyek infrastruktur menerapkan prinsip konservasi sumber daya hayati dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- Memastikan keberlanjutan jasa ekosistem, jika proyek tersebut berpotensi memiliki dampak terhadap jasa ekosistem.

Dalam rangka perlindungan terhadap kehidupan manusia yang terdampak oleh pembangunan infrastruktur, maka PT PII pada tahap penilaian proyek akan memastikan PJKP dan Badan Usaha Pelaksana memiliki komitmen dalam konstruksi dan operasional proyek untuk memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Melakukan usaha terbaik untuk menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat terdampak yang berpotensi timbul dari proyek;
- Memastikan pengadaan tanah yang dibutuhkan oleh proyek dilakukan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan;
- Melakukan perencanaan dengan detail untuk menghindari dampak terhadap Masyarakat Hukum Adat. Namun apabila tidak memungkinkan maka melakukan usaha terbaik untuk meminimalkan dan/atau mengkompensasi dampak negatif proyek yang mungkin terjadi pada Masyarakat Hukum Adat yang keberadaannya diakui oleh peraturan Pemerintah Indonesia.

Dalam hal keragaman budaya dan kelestarian warisan budaya, PT PII akan memastikan PJKP dalam perencanaan proyek telah mempertimbangkan untuk menghindari dampak negatif terhadap budaya lokal dan warisan budaya. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan penilaian proyek dengan seksama dan melibatkan *Stakeholder* dalam penilaian dampak terhadap warisan budaya, jika dampak negatif berpotensi muncul dari proyek tersebut.

MENDORONG REALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN

Dalam rangka memastikan bahwa seluruh proyek yang mendapatkan penjaminan PT PII, tidak mengalami kendala-kendala saat pembangunan berlangsung maupun setelah proyek operasional, Perseroan mengembangkan mekanisme pengelolaan keluhan dari *Stakeholder* yang terdapat di *website* Perseroan yakni <https://ptpii.co.id/id/pengaduan>. Dalam *website* tersebut keluhan atas operasional PT PII dalam memberikan penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur dapat disampaikan melalui saluran tersebut. Jika keluhan yang terkait aspek lingkungan dan sosial maka akan diteruskan ke Divisi Environmental and Social (ENS) dan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penanganan keadaan darurat pada aspek keselamatan lingkungan dan konflik lingkungan di level proyek menjadi tanggung Jawab Badan Usaha Pelaksana (BUP) sesuai dengan lingkup tanggung jawab dalam perjanjian proyek yang disepakati bersama. BUP maupun PJKP disatu sisi, akan senantiasa berpegang pada dokumen kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), dan Rencana Mitigasi Risiko yang telah memuat rencana pengelolaan dan pemantauan dampak dalam menyelesaikan setiap permasalahan menyangkut pengelolaan lingkungan.

MANFAAT LINGKUNGAN PROYEK-PROYEK PENJAMINAN DAN PENDAMPINGAN TRANSAKSI

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan telah memberikan penjaminan terhadap 22 (dua puluh dua) proyek, selain menjalankan peran penugasan dalam kerangka penyiapan proyek pendampingan transaksi yang dikenal sebagai *Project Development Facility* (PDF) pada sedikitnya 6 (enam) proyek pembangunan infrastruktur, seluruhnya terbagi ke dalam 8 (delapan)

sektor ekonomi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Perseroan memberlakukan metode penapisan yang ketat, mengacu pada praktik terbaik sesuai standar pelaksanaan program penjaminan Bank Dunia, sehingga diharapkan seluruh risiko dampak potensial telah dimitigasi dan diminimalisir, namun di sisi lain, benefit lingkungannya menjadi optimal. Sehingga benefit dari realisasi penjaminan maupun pelaksanaan kerangka PDF proyek ini justru berkontribusi signifikan terhadap pencapaian beragam tujuan pembangunan SDGs pada aspek lingkungan.

Sesuai hasil analisa yang dilaksanakan, masing-masing proyek memberikan manfaat lingkungan yang beragam selaras dengan besaran investasi maupun tujuan utama dari realisasi proyek dimaksud. Namun demikian, terdapat beberapa manfaat yang perlu diperhatikan, yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs dari sisi lingkungan, yakni: SDGs Ke 6 - Air Bersih dan Sanitasi, SDGs ke 7 - Energi Bersih dan Terjangkau, SDGs ke 13 - Aksi Terhadap Iklim dan SDGs Ke 14 - Kehidupan Bawah Air.

Beberapa proyek tersebut secara spesifik memberi kontribusi nyata pada pencapaian tujuan SDGs ke 13 - Aksi terhadap Iklim, berupa penurunan emisi GRK, yang selaras dengan komitmen Pemerintah. Dari berbagai proyek di delapan sektor ekonomi tersebut, lima sektor ekonomi di antaranya memberi kontribusi nyata bagi penurunan emisi GRK. Dua sektor di antaranya yakni proyek-proyek pada sektor ketenagalistrikan dan sektor jalan tol kontribusi penurunan emisi GRK nya dapat dihitung secara kuantitatif dan ditampilkan, sementara tiga lainnya, yakni: sektor telekomunikasi, perkereta apian dan pariwisata tidak dapat dihitung. Berikut uraian singkat manfaat lingkungan dari proyek-proyek pada kelima sektor tersebut.

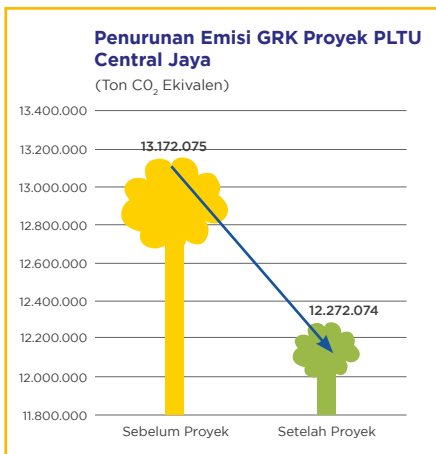
1. Manfaat Lingkungan dari Proyek-proyek di Sektor Ketenagalistrikan

Nama Proyek	Manfaat Lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> Central Java Power Plant (2 x 1000) MW Mini Hydropower - Lapai (2 x 2,656 kW) Mini Hydropower - Kalibumi (3 x 2,115 kW) 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan emisi GRK sebesar 900.000 ton CO₂ ekuivalen dari pemanfaatan teknologi Super Ultra Critical (SUC) yang dapat mengurangi emisi GRK sebesar 6,0-9,2% dari teknologi sebelumnya. Penurunan emisi SO₂ berkat penggunaan teknologi SUC. Penurunan emisi GRK berasal dari substitusi penggerak turbin, dari biasanya energi fosil, menjadi tenaga air yang tanpa emisi. Besaran penurunan emisi adalah 30,482 ton CO₂ ekuivalen dari HPP Lapai 1 dan 47.716 ton CO₂ ekuivalen dari HPP Kalibumi. Terpeliharanya lingkungan tumbuhan maupun satwa sekitar minihidro power agar sumber air tetap terjaga.

Kontribusi Penurunan Emisi GRK

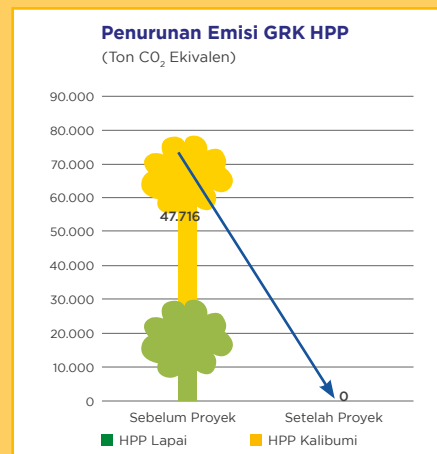
Pada implementasi PLTU teknologi SUC

- Sebelum Proyek, emisi GRK pembangkit PLTU batubara dengan daya yang sama adalah 13.172.075 ton CO₂ ekuivalen per tahun.
- Setelah Proyek, emisi GRK pembangkit PLTU batubara berteknologi SUC dengan daya yang sama adalah 12.272.075 ton CO₂ ekuivalen per tahun.
- Total penurunan emisi GRK 900.000 ton CO₂ ekuivalen per tahun.



Pada Pembangunan Minihidro Power Plant

- Sebelum proyek, besaran emisi pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan daya sama dengan Mini HPP - Lapai dan Kalibumi, masing-masing adalah sebesar 30.482 ton CO₂ ekuivalen dan 47.716 ton CO₂ ekuivalen.
- Berkat pembangunan pembangkit listrik minihidro Lapai 1 dan Kalibumi yang menggunakan tenaga air, emisi CO₂ tersebut jadi nihil.



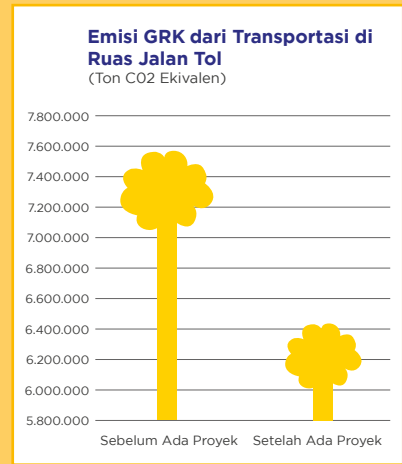
Sumber :

- Nalbandian 2008 - Ultra Supercritical Power Plant.
- Unit Conversions & Emissions Factors, Energy Information Administration - USA
- FS masing-masing Proyek.

MENDORONG REALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN

2. Manfaat Lingkungan dari Proyek-proyek di Sektor Jalan Tol

Nama Proyek	Manfaat Lingkungan	Kontribusi Penurunan Emisi GRK
<ul style="list-style-type: none"> Jalan Tol Batang Semarang Jalan Tol Manado Bitung Jalan Tol Pandaan Malang Jalan Tol Balikpapan Samarinda Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan Jalan Tol Krian Legundi Bunder Manyar Jalan Tol Serang Panimbang Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Jalan Tol Semarang Demak 	<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan emisi GRK dari lebih lancarnya lalu-lintas di ruas jalan non tol sepanjang total 745,01 km. Penurunan emisi GRK dari lebih efisiennya perjalanan di jalan tol. Penurunan emisi ini diproyeksikan semakin meningkat selaras dengan naiknya trafik di jalan tol dimaksud. Penghijauan di lahan pengganti. Tumbuhnya sektor pariwisata berbasis lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Sebelum Proyek, emisi GRK dari transportasi pada ruas jalan sepanjang 745,01 km tersebut sebesar 4.022.100 ton CO₂ ekuivalen per tahun. Setelah Proyek, emisi GRK transportasi pada ruas jalan tol sepanjang 745,01 km tersebut, pada tahun pertama operasional adalah 3.417.520 ton CO₂ ekuivalen per tahun. Total penurunan emisi GRK 615.453 ton CO₂ ekuivalen. Penurunan emisi akan terus meningkat selaras dengan naiknya LHR ruas-ruas jalan tol tersebut.



Sumber :
 1. Dihitung sesuai metode EIA berdasarkan data dari FS masing-masing *project*
 2. Unit Conversions & Emissions Factors, Energy Information Administration - USA
 3. FS masing-masing *project*

3. Manfaat Lingkungan dari Proyek-proyek di Sektor Telekomunikasi

Nama Proyek	Manfaat Lingkungan	Kontribusi Penurunan Emisi GRK
<ul style="list-style-type: none"> Palapa Ring Paket Barat Palapa Ring Paket Tengah Palapa Ring Paket Timur Satelit Multi Fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan Emisi GRK dari mobilitas fisik. Penurunan Emisi GRK dari Penghematan Kertas. Reduksi Emisi GRK dari Penghematan Lahan transmisi untuk Satelit Multi Fungsi. Satelit Multi Fungsi mengeliminasi kebutuhan pemancar BTS, dengan total jumlah pemancar 149.400 titik, dan luas lahan 1.494 Ha. 	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan kontribusi penurunan emisi GRK belum bisa ditampilkan.

Sumber :
 1. Kajian Akhir Prastudi Kelayakan Satelit Multi Fungsi (2018)
 2. FS Proyek Palapa

4. Manfaat Lingkungan dari Proyek Perkereta-apian

Nama Proyek	Manfaat Lingkungan	Kontribusi Penurunan Emisi GRK
<ul style="list-style-type: none"> Jalur Kereta Api Makassar - Parepare 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan Emisi GRK dari substitusi transportasi mobil pribadi ke moda kereta api. Penurunan Emisi GRK dari substitusi transportasi kapal laut ke moda kereta api. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi penurunan GRK sebesar 679 ton CO₂ ekuivalen di tahun pertama operasional penuh. Dihitung dari target peralihan pengguna mobil pribadi ke KA. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Penurunan Emisi GRK dari Peralihan Penggunaan Kendaraan Pribadi Ke KA (Ton CO₂ Ekuivalen)</p> <p style="text-align: center;">679</p> <p style="text-align: center;">Pakai Mobil Pribadi Pakai KA</p> </div>

Sumber :
 1. Dihitung sesuai metode EIA berdasarkan asumsi yang disusun dari data FS project
 2. Unit Conversions & Emissions Factors, Energy Information Administration - USA
 3. FS Proyek Perkeretaapian Makassar - Parepare

5. Manfaat Lingkungan dari Proyek Pariwisata Terpadu KEK Mandalika

Nama Proyek	Manfaat Lingkungan	Kontribusi Penurunan Emisi GRK
<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan Emisi GRK dari aktivitas pengembangan eko wisata 	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan kontribusi penurunan emisi GRK belum bisa ditampilkan.

Sumber: Project Dokumen for Mandalika Urban dan Tourism Infrastructure Project

Selain manfaat lingkungan dari proyek-proyek penjaminan PT PII maupun proyek-proyek dalam kerangka PDF yang dijalankan PT PII, seluruh proyek tersebut juga memiliki beragam manfaat umum lainnya, manfaat ekonomi dan juga manfaat sosial, langsung maupun tidak langsung sebagaimana disampaikan dalam uraian yang relevan.

Berikut rekapitulasi manfaat lingkungan dari berbagai proyek infrastruktur yang mendapatkan penjaminan dari PT PII maupun proyek infrastruktur penugasan dalam kerangka PDF yang dilaksanakan Perseroan sampai dengan tahun 2019.

No	Sektor Proyek	Manfaat Lingkungan	Kontribusi terhadap SDGs di Bidang Lingkungan
1.	<p>Ketenagalistrikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2x1000 MW untuk Pulau Jawa 2 set Hydropowerplant 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan emisi GRK sebesar 900.000 ton CO₂ ekuivalen dari pemanfaatan teknologi <i>Super Ultra Critical (SUC)</i> dari teknologi sebelumnya. Penurunan emisi SO₂ berkat penggunaan teknologi SUC. Penurunan emisi GRK berasal dari substitusi penggerak turbin, dari biasanya energi fosil, menjadi tenaga air yang tanpa emisi. Besaran penurunan emisi adalah 30,482 ton CO₂ ekuivalen dari HPP Lapai 1 dan 47.716 ton CO₂ ekuivalen dari HPP Kalibumi. Terpeliharanya lingkungan tumbuhan maupun satwa sekitar minihidro power agar sumber air tetap terjaga. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian SDGs ke-13 "Aksi Terhadap Iklim" dari proyek PLTU Central Java Mendukung pencapaian SDGs ke-7 "Energi Bersih dan Terjangkau" dari proyek HPP

MENDORONG REALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN

No	Sektor Proyek	Manfaat Lingkungan	Kontribusi terhadap SDGs di Bidang Lingkungan
2.	Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> Palapa Ring 3 Paket (8.479 km kabel optic) Satelit Multifungsi (menghubungkan 149.400 titik layanan <i>offline</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan Emisi GRK dari mobilitas fisik. Penurunan Emisi GRK dari Penghematan Kertas. Reduksi Emisi GRK dari Penghematan Lahan transmisi untuk Satelit Multi Fungsi. Satelit Multi Fungsi mengeliminasi kebutuhan pemancar BTS, dengan total jumlah pemancar 149.400 titik, dan luas lahan 1.494 Ha. Perhitungan kontribusi penurunan emisi GRK belum bisa ditampilkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian SDGs ke-13 "Aksi Terhadap Iklim"
3.	Infrastruktur Jalan <ul style="list-style-type: none"> Sektor Jalan Tol - 11 Ruas Tol (total 745,01 km) Sektor Jalan Non Tol - Preservasi 2 ruas Jalan Nasional (29,87 km) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan emisi GRK dengan peningkatan efisiensi perjalanan sebagai dampak pembangunan tol sepanjang 745,01 km. Penurunan emisi GRK dari lebih efisiennya perjalanan di jalan tol. Penurunan emisi ini diproyeksikan semakin meningkat selaras dengan naiknya trafik di jalan tol dimaksud. Total penurunan emisi GRK saat seluruh proyek jalan telah selesai di tahun pertama, sekitar 615.453 ton CO₂ ekuivalen. Penurunan emisi akan terus meningkat selaras dengan naiknya LHR ruas-ruas jalan tol tersebut. Penghijauan di lahan pengganti. Tumbuhnya sektor pariwisata berbasis lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian SDGs ke-13 "Aksi Terhadap Iklim"
4.	Kesehatan 2 Proyek Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> Proyek belum mengidentifikasi penurunan GRK sebagai manfaat lingkungan. Tapi proyek dapat mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. 	N/A
5.	Sektor Air Minum 3 Proyek SPAM	<ul style="list-style-type: none"> Proyek belum mengidentifikasi penurunan emisi GRK sebagai manfaat lingkungan. Namun Proyek dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya sanitasi dan peningkatan kualitas kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian SDGs ke-14 "Kehidupan bawah Air".
6.	Perkeretaapian KA Makassar - Parepare	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan Emisi GRK dari substitusi transportasi mobil pribadi ke moda kereta api. Penurunan Emisi GRK dari substitusi transportasi kapal laut ke moda kereta api. Kontribusi penurunan GRK sebesar 679 ton CO₂ ekuivalen di tahun pertama operasional penuh, yang berasal dari target peralihan pengguna mobil pribadi ke KA. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian SDGs ke-13 "Aksi Terhadap Iklim"
7.	Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata - Mandalika - Lombok Nusa Tenggara Barat	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan Emisi GRK dari aktivitas pengembangan eko wisata 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian SDGs ke-13 "Aksi Terhadap Iklim"
8.	Perhubungan Proving Ground Bekasi	N/A	N/A

Sumber:

- Project Dokumen for Mandalika Urban dan Tourism Infrastructure Project
- Kajian Akhir Prastudi Kelayakan Satelit Multi Fungsi (2018)
- Feasibility Study masing-masing proyek.

Keberadaan PT PII dalam memberikan penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur merupakan kontribusi dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, PT PII merasa perlu untuk berkolaborasi dengan berbagai *Stakeholder* - salah satunya komunitas ilmiah, dengan berkontribusi dalam forum ilmiah

untuk menyampaikan peran PT PII dalam mengemban amanatnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Partisipasi dalam forum ilmiah menjadi media *stakeholder* engagement dengan komunitas akademisi dan menjadi saran untuk mendapatkan *feedback* perbaikan kegiatan operasional di masa depan, terutama dalam hal perlindungan aspek lingkungan dan sosial pada pembangunan infrastruktur.

Partisipasi PT PII dalam forum ilmiah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

No	Judul	Author	International Conference/Buku	Publikasi
1.	Penjaminan Infrastruktur: Terobosan Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Tarik Investor dan <i>Bankability</i> pada Proyek Infrastruktur	Yuki M.A Wardhana	Buku: <i>Terobosan Pembiayaan Infrastruktur</i> . Penerbit: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2019)	Buku: <i>Terobosan Pembiayaan Infrastruktur</i> . Penerbit: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2019)
2.	<i>Acceleration of Water Fulfilment in Indonesia</i>	Yuki M.A Wardhana	<i>International Conference on Environmental Science and Sustainable Development 2019</i>	<i>Accepted Journal of Environmental Science and Sustainable Development (Edition July 2020)</i> Oral presentation
3.	<i>The Role of Government Guarantees in Environmental and Social Management for Infrastructure Development</i>	Dwi Susanto; M. Irfan Abadi; Yuki M A. Wardhana	<i>The 1st International Seminar on Natural Resources and Environmental Management 2019</i>	<i>Proceeding The 1st International Seminar on Natural Resources and Environmental Management 2019</i> Poster presentation
4.	<i>The Economic Impact of Government Guarantee for PPP Water Supply Project in Indonesia</i>	Yuki M.A Wardhana	<i>Researchers Day 2019: Connecting Research and Policy by Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance and University of Sydney</i>	<i>Proceeding Researchers Day 2019: Connecting Research and Policy</i> Oral presentation
5.	<i>The Role of Government Guarantee in Land Procurement for Infrastructure Development in Indonesia</i>	Dwi Susanto; Annisa Nur Fauziah; Rido Mubayin R.; Listiani Cita U.	<i>Integrated Agrarian, Land, and Spatial Planning Policies for Sustainable Development</i>	<i>Proceeding Integrated Agrarian, Land, and Spatial Planning Policies for Sustainable Development</i> Oral presentation
6.	<i>PPP and Government Guarantee to Strengthen SDGs In Indonesia</i>	Annisa Nur Fauziah; Yuki M.A. Wardhana	<i>International Conference on Environmental Science and Sustainable Development 2019</i>	<i>Proceeding International Conference on Environmental Science and Sustainable Development 2019</i> Oral presentation

07

Tata Kelola Keberlanjutan



TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

PT PII menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas praktik terbaik GCG dengan menerapkan seluruh prinsip-prinsip tata kelola dan mengembangkan sistem pengelolaan risiko terintegrasi dalam menjalankan kegiatan penjaminan.

Upaya tersebut membuat PT PII meraih berbagai penghargaan dari pihak independen di bidang tata kelola perusahaan.

KOMITMEN DAN TUJUAN

Bagi PT PII, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kebutuhan dasar dan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha. PT PII berkomitmen menjadikan penerapan GCG sebagai salah satu indikator kerja, serta berupaya secara konsisten menumbuhkan penerapan kode etik dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai nilai dan budaya Perusahaan yang melekat pada seluruh karyawan. Hal ini merupakan wujud komitmen PT PII untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan perusahaan kepada para pemangku kepentingan sehingga terbangun organisasi yang bersih dan bermartabat.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA

PT PII memperhatikan pemetaan fungsi atau kegiatan usaha dengan standar etika bisnis serta memastikan terjadinya mekanisme *check and balance* yang dapat bekerja secara efektif, dilaksanakan dengan membentuk Struktur Tata Kelola Perseroan yang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Sistem kepengurusan Perseroan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Perseroan juga memiliki organ dan fungsi pendukung lainnya, seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, sistem pengendalian internal, serta manajemen risiko, yang dibentuk berdasarkan peraturan dan ketentuan

yang berlaku. Adapun efektivitas penerapan GCG tersebut kemudian dilihat dari keselarasan atas 3 (tiga) aspek *governance system* yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan. Melalui RUPS, pemegang saham mengambil keputusan yang didasarkan pada kepentingan Perusahaan, serta dilakukan secara wajar dan transparan.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, pada tahun 2019 Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yakni RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 23 Mei 2019 dan RUPS Persetujuan RKAP Tahun Buku 2020 tanggal 17 Desember 2019.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap jalannya pengelolaan Perusahaan oleh Direksi agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan, termasuk memastikan dukungan Perseroan bagi pencapaian tujuan keberlanjutan.

Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen. Kemudian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajemen perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN






Komite Pemantau Risiko. Fungsi pengawasan dan penasihat ini dilaksanakan melalui pertemuan rutin yang diadakan dengan Direksi serta melalui pendelegasian tugas dan kewenangan kepada masing-masing Komite terkait.

Dewan Komisaris menjalankan tugas dan kewenangannya dengan mengacu pada Tata Laksana Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang terakhir kali diperbarui pada Desember 2019 serta Pedoman Dewan Komisaris yang terakhir kali diperbarui pada bulan Desember 2017.

Jumlah, Komposisi dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Pada tahun 2019, tidak terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, sehingga jumlah, komposisi dan pengangkatan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Domisili	Nomor Keputusan Menteri Keuangan
<p>Ayu Sukorini</p> 	Komisaris Utama	Jakarta	KMK Nomor 402/KMK.06/2017

Nama	Jabatan	Domisili	Nomor Keputusan Menteri Keuangan
<p>Mariatul Aini</p> 	Komisaris	Jakarta	KMK Nomor 861/KMK.06/2018 dan diangkat kembali berdasarkan KMK Nomor 720/KMK.06/2019
<p>M. Rahman Ritza</p> 	Komisaris	Jakarta	KMK Nomor 402/KMK.06/2017

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki tanggung jawab penuh secara kolegal atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi memiliki Pedoman yang secara berkala dievaluasi dan terakhir kali diperbaharui melalui Surat Keputusan Bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Nomor SK002/BOD/CSC/1219

dan Nomor KEP-10/KOM/PII/12/2019 antara Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pengesahan Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Pada tahun buku 2019, terdapat perubahan komposisi anggota Direksi dimana Perseroan menerima pengunduran diri Armand Hermawan sebagai Direktur Utama dan mengangkat Muhammad Wahid Sutopo untuk menjadi Direktur Utama PT PII. Seluruh anggota Direksi PT PII telah lulus *fit and proper test* serta diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagai RUPS.

Adapun Komposisi Direksi PT PII per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Domisili	Nomor SK
<p>Muhammad Wahid Sutopo</p> 	Direktur Utama	Jakarta	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 890/KMK.06/2019
<p>Salusra Satria</p> 	Direktur	Jakarta	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/KMK.06/2017

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

MANAJEMEN RISIKO

PT PII melalui Divisi *Risk Management* telah mengembangkan suatu Kerangka Pengelolaan Risiko Perseroan (*Enterprise Risk Management/ERM Framework*) menggunakan acuan utama ISO 31000:2009. Proses manajemen risiko Perseroan menganut konsep *three lines of defense* dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Direksi, Audit Internal, fungsi Risk Management, serta para karyawan yang berada di divisi masing-masing, agar timbul pemahaman dan kepemilikan (*ownership*) atas risiko yang dihadapi Perseroan. Pengelolaan manajemen risiko di PT PII dilakukan secara terintegrasi dengan strategi bisnis.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Tujuan utama sistem pengendalian internal selain pada upaya mendukung tercapainya visi dan misi Perusahaan, melainkan juga untuk meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalisasi risiko kerugian serta menjaga kepatuhan Perseroan pada ketentuan dan peraturan penundang-undangan yang berlaku. PT PII telah memiliki Pedoman Sistem Pengendalian Internal yang di dalamnya mengatur secara rinci mengenai 5 (lima) komponen sistem pengendalian Internal Perusahaan yakni: Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Aktivitas pengendalian (*Control Activity*), Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*), Pemantauan (*Monitoring*).

Implementasi sistem pengendalian internal PT PII mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework*. Selain itu Perseroan juga telah mendefinisikan peran Dewan Komisaris maupun Direksi dalam Sistem Pengendalian Internal.

BENTURAN KEPENTINGAN

PT PII telah memiliki dan mengimplementasikan kebijakan internal yang mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi membuat pernyataan tidak memiliki Benturan Kepentingan yang diperbarui setiap tahun.

AUDIT INTERNAL

Audit Internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas internal control, *risk management* dan *governance process*. Audit Internal juga memastikan proses pengelolaan dan operasional Perusahaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mendukung kepentingan dan tujuan Perseroan. Audit Internal bertanggung jawab memastikan kecukupan dan proses pengendalian intern telah berjalan sebagaimana mestinya.

KODE ETIK PERUSAHAAN

PT PII memiliki dan menerapkan Kode Etik yang menjadi pedoman perilaku seluruh insan Perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Kode Etik tersebut menjadi dasar sikap dan tindakan karyawan agar bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai utama Perseroan serta regulasi internal dan eksternal yang berlaku. Butir-butir Kode Etik Perusahaan kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi berbagai kebijakan, seperti: Pedoman Anti Gratifikasi, Pedoman Komunikasi, dan Mekanisme Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan upaya pengendalian internal, PT PII telah memiliki dan mengimplementasikan kebijakan serta sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System - WBS*). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran PT PII disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui Surat Keputusan Bersama pada tanggal 26 April 2018. WBS adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik *good governance*.

Uraian lebih lengkap mengenai Praktik terbaik GCG yang diterapkan Perseroan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas penerapannya disampaikan dalam pembahasan Bab Tata Kelola Perusahaan - Laporan Tahunan PT PII.

ASSESSMENT PENGETAHUAN DAN PERSEPSI STAKEHOLDER

PII didirikan dengan tugas utama adalah mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dengan salah satunya memberikan penjaminan dan pendampingan untuk pelaksanaan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Untuk itu PII harus senantiasa dapat memastikan bahwa komunikasi dan koordinasi pelaksanaan tugas telah dilakukan dengan efektif, mengingat model bisnis yang dijalankan melibatkan investasi bernilai besar, berjangka panjang serta berisiko. Untuk menilai efektivitas komunikasi tersebut Perseroan melaksanakan Survei Pengetahuan dan Persepsi terhadap *stakeholder* PT PII.

Dalam survei ini, digunakan *purposive sampling*, menggunakan 31 sampel responden (26 *existing stakeholder* dan 5 *potential stakeholder*). Survei dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner pada responden secara langsung. Kemudian, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai persepsi dan ekspektasi responden terhadap PT PII dan proses penjaminan infrastruktur, maka dilakukan sesi wawancara setelah responden selesai mengisi kuesioner yang diberikan. Sementara itu, pengolahan data dilakukan menggunakan metode *indexing* dan melakukan analisis dengan matriks *importance-performance* (IPA).

Hasil survei menunjukkan rata-rata tingkat pengetahuan *existing stakeholder* PT PII sebesar 4,09 dan masuk dalam kategori “Sangat Teredukasi”. Sementara rata-rata persepsi kinerja PT PII di mata *existing stakeholder* sebesar 4,06 dan rata-rata persepsi kinerja PT PII di mata *potential stakeholder* sebesar 4,58 atau masuk dalam kategori “Sangat Positif”.

Jika dirangkum, indeks pengetahuan dan persepsi kinerja dari para *existing stakeholder* PT PII adalah sebesar 4,08 dari skala 5 yang berada pada level “Satisfactory”. Untuk nilai gabungan persepsi kinerja PT PII di mata *existing* dan *potential stakeholder* adalah sebesar 4,32 atau termasuk kategori “Sangat Positif”.

Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, baik pengetahuan maupun persepsi *existing* dan *potential stakeholder* terhadap PT PII dapat dikatakan **“Memuaskan”/”Satisfactory.”** Tabel berikut menggambarkan hubungan antara persepsi dan pengetahuan, dimana “Satisfactory” adalah kondisi dimana para *stakeholder* paham akan PT PII dan menerima PT PII sebagai sesuatu yang positif (merupakan gabungan dari kategori pemahaman: paham, dan persepsi yang positif).

Kondisi Pemahaman vs Persepsi		Persepsi	
		Positif	Negatif
Pemahaman	Paham	<i>Satisfactory</i>	<i>Unsatisfactory</i>
	Tidak Paham	<i>Beyond Expectation</i>	<i>Beware</i>

Sumber : Hasil olahan data Penelitian BRIEF (Business and Indonesia Economic Forecasting).

Halaman ini sengaja dikosongkan

2019

LAPORAN KEBERLANJUTAN



**PENJAMINAN &
INFRASTRUKTUR**
Guarantee & Infrastructure

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Capital Place, Lt 7 & 8

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18

Jakarta 12710 -Indonesia

Tel : 021-5795 0550

Fax : 021-5795 0040

Website : www.ptpii.co.id

#Jagainfrastruktur

#Indonesiamaju



PT PII Channel



PII_Persero

